



REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM TAHUN 2016-2021



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. KhatibSulaiman No. 11 Telp.(0751) 7055292-7055298, Fax (0751) 7052701 Padang

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

BAB I

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan..... 4

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA
BARAT 6**

2.1. Tugas, Fungsi dan Strukur Organisasi..... 6

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UMKM 11

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM 25

2.4. Tantangan dan Peluang..... 37

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 40

3.1. Identifikasi Permasalahan Sesuai Tupoksi Pelayanan SKPD 40

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD Provinsi Sumatera Barat 44

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 45

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis 48

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 49

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... 44

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 45

4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD 51

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK

SASARAN PENDANAAN INDIKATIF	53
5.1. Uraian Singkat	53
5.2. Pendanaan Indikatif	56

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI SUMATERA

BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN	77
---	-----------

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 : Kualifikasi Pendidikan Pegawai ..	13
Tabel 2.2 : Kualifikasi Pangkat dan Golongan ..	13
Tabel 2.3 : Kualifikasi Jabatan ..	14
Tabel 2.4 : Capaian Kinerja Pelayanan ..	17
Tabel 2.5 : Anggaran dan realisasi Pendanaan Dinas Koperasi, UKM	22
Tabel 2.6 : Perkembangan Koperasi di Sumatera Barat	23
Tabel 2.7 : Perkembangan Modal, Aset, Volume Usaha dan SHU Koperasi Di Sumatera Barat Thn 2011-2015	26
Tabel 2.8 : Komparasi capaian Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM Terhadap Renstra Kab/Kota dan Kemenkop	29
Tabel 3.1 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat	32
Tabel 3.2 : Identifikasi Isu-Isu Strategis	34
Tabel 3.3 : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	35
Tabel 3.4 : Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan Kemenkop RI	38
Tabel 3.5 : Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Dinas Koperasi, UKM	41
Tabel 3.6 : Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	41
Tabel 3.7 : Nilai Skala Kriteria	42
Tabel 4.1 : Tujuan dan target Capaian Setelah Perubahan	45
Tabel 4.2 : Perubahan Sasaran dan Target Pencapaian	47
Tabel 4.3 : Matrik Hubungan antara Tujuan dan sasaran	48
Tabel 4.4 : Pencapaian Sasaran strategis Sesuai target Jangka Menengah	49
Tabel 4.5 : Hubungan Strategis Antara Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Strategi Dan Kebijakan	51
Tabel 5.1 : Tabel Pendanaan pagu Indikatof	57
Tabel 6.1 : Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM yang Mengacu pada Sasaran dan Tujuan RPJMD	77

DAFTAR GRAFIK

	... Hal
Grafik 1 Perkembangan Koperasi di Sumatera Barat	24
Grafik 2. Tingkat Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi/KSP Tahun 2011-2015 ..	25
Grafik 3. Perkembangan Modal, Aset, Volume Usaha dan SHU Koperasi di Sumatera Barat	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021 telah ditetapkan pada tanggal September 2016 melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/19/DISKOP-UMKM/IX/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Dengan terbitnya:

- a. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128)
- b. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Keduakuan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- d. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 02/KEP/M.KUMKM/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penerimaan Program PLUT-KUMKM melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021, sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran SKPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyiapkan dan menyusun Rencana Strategis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penyusunan Renstra SKPD merupakan bagian perencanaan pembangunan nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk urusan koperasi dan UMKM merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Secara teknis penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan Koperasi dan UKM di daerah, diperlukan suatu dokumen perencanaan serta sistem pembinaan yang konseptual, terarah dan efektif yang menuntun para aparat pembina bekerja. Oleh karena itu penting adanya suatu pola yang akan dapat dijadikan acuan umum penyusunan program kerja agar kegiatan-kegiatan pembangunan koperasi dan UKM dapat lebih berhasil mendukung

pencapaian kinerja pembangunan daerah. Salah satu bentuk pola acuan perencanaan tersebut adalah penyusunan dokumen “**Rencana Strategis**“, yang akan dapat dijadikan arahan dan pegangan dalam pengembangan program – program pembangunan koperasi dan UKM, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Renstra Dinas Koperasi, UKM merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan adanya Renstra Dinas Koperasi, UKM ini, diharapkan Dinas Koperasi, UKM mampu mengoptimalkan peranannya dalam menunjang kegiatan pembangunan secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka keselarasan dan sinkronisasi penyusunan program kerja pembangunan koperasi dan UMKM pada Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat disusun dengan mempedomani Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI. Disamping itu, agar pencapaian sasaran strategis lima tahun ke depan dapat tercapai harus didukung oleh pencapaian sasaran strategis yang dimuat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Kabupaten/Kota, untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi terhadap program-program pembangunan koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya memiliki landasan formil dan materil sebagai dasar hukumnya.

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128)

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.
23. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 02/KEP/M.KUMKM/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penerimaan Program PLUT-KUMKM melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018

Landasan Materilnya adalah masukan berupa inspirasi, aspirasi, saran dan pendapat para aparat unit kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat serta instansi terkait baik pusat maupun daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Bertitik tolak dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka penyusunan dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM ini dimaksudkan untuk memberikan acuan/landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan yang merupakan suatu proses berorientasi outcome (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran setiap akhir tahun.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM ini adalah :

- a. Untuk menetapkan visi, misi, arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan strategis selama 5 (lima) tahun.

- b. Untuk menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana kerja serta perencanaan penganggaran lima tahunan.
- c. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparat Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan rencana pengembangan yang sifatnya operasional dan rinci.
- d. Untuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan program pembangunan dan tolak ukur evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan koperasi dan UMKM.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, dan landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI SUMATERA BARAT

Menjelaskan tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian dan kelengkapan, tupoksi dan sistem prosedur pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menjelaskan tentang kinerja pelayanan, kelemahan dan kekuatan internal, peluang dan tantangan eksternal, dan rumusan permasalahan strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan tentang program dan kegiatan SKPD, pagu indikatif

dan indikasi sumber pendanaan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun.

**BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI
SUMATERA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD**

Menjelaskan tentang indikator kinerja SKPD yang mengacu pada RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI SUMATERA BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) , yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dalam menyelenggarakan tugas tersebut, mempunyai fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor : 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi , sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan kesekretariatan dinas
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinansan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat dan Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat adalah :

- 1) **Sekretariat**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- (a) penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas
- (b) penyelenggaraan pembinaan dan penatan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
- (c) Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

- 2) **Bidang Perizinan dan Kelembagaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perizinan, kelembagaan, monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
 - (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
 - (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang kelembagaan
 - (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi
- 4) **Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan, pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi.
Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :
 - (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian
 - (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan
 - (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan peraturan dan sanksi
- 5) **Bidang Pemberdayaan Koperasi**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan koperasi, fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas sdm koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.
Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :
 - (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha koperasi
 - (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas sdm koperasi

(c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi

6) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan usaha kecil, fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil, peningkatan kualitas kewirausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

(a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha kecil

(b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporandi bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil

(c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan

7) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pendidikan dan latihan koperasi, Untuk menyelenggarakan tugas pokok UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

(a) penyusunan rencana pembangunan teknsi operasional pendidikan dan latihan koperasi

(b) pengkajian dan analisa teknis operasional pendidikan dan latihan koperasi

(c) pengujian dan persiapan teknologi pendidikan dan latihan koperasi dilapangan

(d) pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan latihan koperasi

(e) pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan koperasi

(f) pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan koperasi

(g) pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

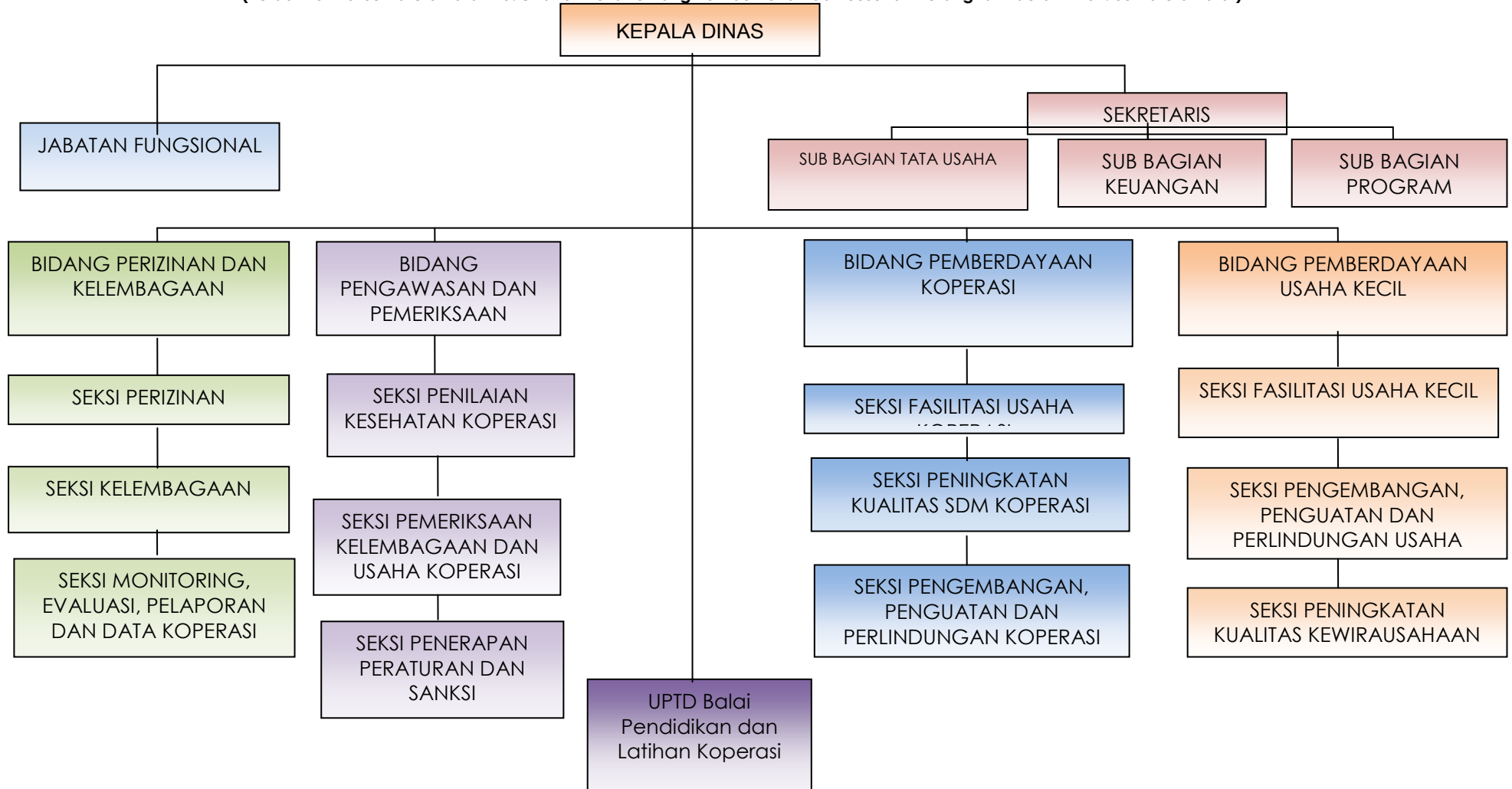
2. Sekretariat, yang membawahi :

- a. Sub. Bagian Tata Usaha
 - b. Sub. Bagian Keuangan
 - c. Sub. Bagian Program
- 3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, yang membawahi :**
- a. Seksi Perizinan
 - b. Seksi Kelembagaan
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- 4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, yang membawahi :**
- a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi
 - b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 - c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- 5. Bidang Pemberdayaan Koperasi, yang membawahi:**
- a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
 - c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
- 6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, yang membawahi:**
- a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
 - b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 061/8953/SJ perihal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Desember 2017, maka struktur organisasi UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi (BALATKOP) Propinsi Sumatera Barat, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
- b. Kasubag Tata Usaha
- c. Kasi Pelaksanaan Program dan Pengembangan
- d. Kasi Penyelenggaraan Diklat

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI SUMATERA BARAT
 (Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumatera Barat)



2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Dinas Koperasi, UKM sebanyak 75 orang dengan latar belakang pendidikan S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 27 orang, D3 sebanyak 5 orang, SLTA sebanyak 33 orang, SLTP sebanyak 0 orang dan SD sebanyak 0 orang.

Jabatan struktural eselon II, III dan IV sebanyak 25 dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 3 orang yang terdiri dari penyuluh perindustrian dan perdagangan sebanyak 1 orang, arsiparis sebanyak 1 orang dan widyaiswara sebanyak 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Kualifikasi Pendidikan Pegawai

	Pendidikan							JML
	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
PNS	0	0	33	5	27	10	-	75
Non PNS								
JUMLAH ORANG	0	0	33	5	27	10	-	75

Tabel 2.2
Kualifikasi Pangkat dan golongan

JENIS KEPEGAWAIAN	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	JUMLAH
PNS	0	9	52	14	75
PTT/HONOR	-	-	-	-	
JUMLAH ORANG	0	9	52	14	75

Tabel 2.3
Kualifikasi Jabatan

J A B A T A N				
ESELON II	ESELON III	ESELON IV	FUNGSIONAL	JUMLAH
1	6	18	3	30

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Berikut sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat :

a. Tanah

No Urut	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ konstruksi (P,S,D)	Satuan	Ket
1	Tanah Perkantoran	1992	2,935	M2	Jl. Khatib Sulaiman No. 11 Belanti Timur Padang
2	Tanah Perumahan	1993	1,819	M2	Jl. Sawo Simpang Jalan Bunda Ulak Karang
3	Tanah Perkantoran	1978	1,500	M2	Jl. S Parman No 211 Ulak Karang Padang
4	Tanah Mess	1994	1,175	M2	Jl. S Parman No 238 Ulak Karang Padang
5	Tanah Perumahan	1994	194	M2	Jl. Linggarjati No 21-A Parupuk Tabing Padang

b. Bangunan

No Urut	Nama/ Jenis Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/ konstruksi	Satuan	Ket
1	Bangunan Kantor	1992	P Bertingkat 2 lt 1.350 M2	Unit	Jl.Kh. Sulaiman No. 11 Pdg
2	Bangunan Kantor Koperasi	1995	P 35 M2	Unit	Jl.Kh. Sulaiman No. 11 Pdg
3	Bangunan Kantor Blkg	1996	P 24 M2	Unit	Jl.Kh. Sulaiman No. 11 Pdg
4	Bangunan Musholla	1992	P 35 M2	Unit	Jl.Kh. Sulaiman No. 11 Pdg
5	Bangunan Rmh Tinggal	1994	P 18 M2	Unit	Jl.Kh. Sulaiman No. 11 Pdg

6	Bangunan Rmh Dinas	1982	P 97 M2	Unit	Jl. Sawo Sp. Jl Bunda Ulak Karang Pdg
7	Bangunan Kantor	1990	P 684 M2	Unit	Jl. S. Parman No 211 U.Krg Pdg
8	Bangunan Kantor Blkg	1990	P 82,5 M2	Unit	Jl. S. Parman No 238 U.Krg Pdg
9	Bangunan Garase dan Gudang	1990	P 75 M2	Unit	Jl. S. Parman No 238 U.Krg Pdg
10	Bangunan Musholla	1990	P 37 M2	Unit	Jl. S. Parman No 238 U.Krg Pdg
11	Bangunan Mess	1995	P 648 M2	Unit	Jl. S. Parman No 238 U.Krg Pdg
12	Bangunan Rumah Dinas	1995	P 62 M2	Unit	Jl. Linggar Jati No 21-A perupuk tab Pdg

c. Kendaraan dinas

No Urut	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Satuan
1	Nisan/ Terano	2004	1 Unit
2	Isuzu Panther Grand Touring	2012	1 Unit
3	Innova	2013	1 Unit
4	Kendaraan Roda Dua Hodan Black	2014	1 Unit
5	Kendaraan Roda Dua Scoopy	2014	3 Unit

d. Peralatan kantor

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah
1	Meja Kerja Staf	2010, 2012, 2014, 2015	21 Unit
2	Kursi Kerja Staf	2005, 2014, 2015	37 Unit
3	Meja Eselon III	2013	4 Unit
4	Kursi Kerja Eselon III	2013	4 Unit
5	AC Split	2012,2015	10 Unit
6	Ac Standing	2014, 2015	4 Unit
7	Komputer	2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015	29 Unit
8	Printer	2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015	31 Unit
9	Filing Cabinet	2009, 2010, 2011, 2012, 2016	26 Unit
10	Almari Besi	2012, 2014, 2015	9 Unit
11	Almari Buku	2014	3 Unit
12	Laptop	2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014	13 Unit
13	Mesin Absensi	2013	2 Unit

14	Kursi Rapat	2005, 2012	80 Unit
15	LCD Proyektor	2008, 2011, 2012, 2015	5 Unit
16	Mesi Tik	2008, 2010, 2011, 2012	13 Unit
17	Genset	2007, 2010	3 Unit
18	Pompa Air	2010, 2015	2 Unit
19	Brankas	2010	1 Unit
20	Kulkas	2010, 2015	4 Unit
21	Lemari Arsip	2014	2 Unit
22	Wireless	2010, 2015	3 Unit
23	Sound System	2007, 2012	2 Unit
24	Meja Rapat	2004, 2005	16 Unit
25	Televisi	2005, 2013, 2015	5 unit
26	Kamera	2013, 2015	2 unit
28	Mic Conference	2015	2 unit
29	Mesin Penghancur kertas	2016	2 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari pencapaian target kinerja sasaran strategis bidang koperasi dan UMKM selama periode Rencana Strategis tahun 2010-2015. Pencapaian ini menjadi landasan bagi penyempurnaan kebijakan yang sudah ada dan penyusunan kebijakan lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan koperasi dan UMKM yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 sesuai dengan target pada indikator kinerja dapat disampaikan capaian kinerja pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM
Tahun 2011 – 2015

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah koperasi yang ditingkatkan kualitasnya (unit)	-	-	-	41	44	47	-	-	45	51	54	-	-	109,76	115,91	114,9	-	-
2	Jumlah koperasi yang bersertifikasi (unit)	-	-	-	5	10	15	-	-	-	20	20	-	-	-	200	133,3	-	-
3	Penurunan koperasi tidak aktif (%)	-	-	-	2	2	2	-	-	1,7	3,05	1,8	-	-	85	152,5	90	-	-
4	Jumlah koperasi yang berprestasi dan akuntabel (unit)	-	-	-	20	22	24	-	-	16	31	19	-	-	80	140,91	79,17	-	-
5	Jumlah pengelola koperasi dan LKM yang dilatih (org)	-	-	-	200	300	400	-	-	180	500	587	-	-	90	166,67	146,8	-	-
6	Jumlah aparatur pembina yang dilatih (org)	-	-	-	120	240	-	-	-	90	180	-	-	-	75	75	-	-	-
7	Jumlah UMK yang dilatih (org)	-	-	-	180	270	360	-	-	180	300	387	-	-	100	111,11	107,5	-	-
8	Jumlah PKL yang diberi bantuan modal (org)	-	-	-	9000	1000	11000	-	-	9000	10932	11930	-	-	100	109,32	108,5	-	-
9	Jumlah UMK yang difasilitasi (UMK)	-	-	-	190	380	570	-	-	190	2229	1131	-	-	100	586,58	198,4	-	-
10	Jumlah KSP/USP,KJKS/UJKS yang berperan dalam pembiayaan	-	-	-	30	40	50	-	-	36	82	52	-	-	100	205	104	-	-
11	UMKMK yang bermitra dengan lembaga pembiayaan	-	-	-	17	19	21	-	-	17	53,49	22,8	-	-	100	281,53	108,6	-	-
12	Jumlah koperasi yang berperan dalam sektor riil (unit)	-	-	-	15	22	3	-	-	15	22	30	-	-	100	100	100	-	-
13	Persentase koperasi aktif	-	-	-	-	-	-	71	71,5	-	-	-	69,03	70,2	-	-	-	97,2	97,7
14	Persentase peningkatan tingkat kesehatan usaha simpan pinjam	-	-	-	-	-	-	31	32	-	-	-	32,57	40,5	-	-	-	105	126
15	Persentase peningkatan volume usaha	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	9,74	-	-	-	-	64,9
16	Return on Asset	-	-	-	-	-	-	9,75	-	-	-	-	6,01	-	-	-	-	-	61,6
17	Aset Turn Over	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	1,53	-	-	-	-	-	102
18	Persentase UMKM binaan yang memiliki legalitas usaha	-	-	-	-	-	-	35	28,57	-	-	-	42,57	60,4	-	-	-	-	122
19	Persentase UMKM binaan yang mengakses permodalan ke perbankan/BUMN	-	-	-	-	-	-	30	9	-	-	-	45	9,55	-	-	-	-	150
20	Persentase peningkatan UMK yang bermitra	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	50,1	-	-	-	-	125

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 sesuai dengan target pada indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja jumlah koperasi yang ditingkatkan kualitasnya dengan target 41 unit pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 54 unit. Pencapaian ini disebabkan dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi dan Kab/Kota.
2. Indikator kinerja jumlah koperasi yang bersertifikasi dengan terget 5 unit tahun 2011 hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 20 unit. Pencapaian ini disebabkan adanya program sertifikasi bagi pengelola koperasi yang bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional. Serifikasi bagi koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola koperasi khususnya koperasi pengelola jasa keuangan.
3. Indikator Kinerja penurunan koperasi tidak aktif dengan target 2% pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 1,80%. Pencapaian ini disebabkan adanya penumbuhan koperasi baru dan pembubaran koperasi serta kegiatan pembenahan koperasi tidak aktif dengan cara pendampingan, bedah kasus, penyuluhan dll.
4. Indikator kinerja jumlah koperasi yang berprestasi dan akuntabel dengan target 20 koperasi. Pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 66 koperasi. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan penilaian koperasi berprestasi /koperasi award mulai dari tingkat Kabupaten /Kota, Provinsi dan tingkat Pusat.
5. Indikator kinerja jumlah pengelola koperasi dan LKM yang dilatih dengan target 200 orang pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 587 orang. Pencapaian ini didukung oleh program pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi dan UMKM di Kab/Kota
6. Indikator kinerja jumlah aparatur pembina yang dilatih dengan target 120 orang pada tahun 2011, hingga tahun 2012 tercapai sebanyak 270 orang. Namun pada tahun 2013 target jumlah aparatur

pembina yang dilatih sebanyak 360 orang tidak dapat direalisasikan karena program/kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut tidak dialokasikan karena keterbatasan alokasi anggaran.

7. Indikator kinerja jumlah UMK yang yang dilatih dengan target 180 orang pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 387 orang. Pencapaian ini didukung oleh program /pendidikan dan pelatihan bagi UMK.
8. Indikator kinerja jumlah PKL yang diberi bantuan modal dengan target 9000 orang pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 11.930 orang. Pencapaian ini didukung melalui kegiatan pemberian modal bagi pedagang kaki lima (PKL) yang berintegrasi pada koperasi. Tujuan pemberian bantuan modal bagi PKL adalah untuk meningkatkan permodalan dalam mengembangkan usaha.
9. Indikator kinerja jumlah UMK yang difasilitasi 190 UMK pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 1.131 UMK. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan pemberdayaan, kemitraan, promosi dan pemasaran, peningkatan akses permodalan, penguatan kelembagaan, bantuan prasarana prasarana, dan bantuan sertifikat halal.
10. Indikator kinerja jumlah KSP/USP, KJKS/UJKS yang berperan dalam pembiayaan dengan target 36 koperasi pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 52 koperasi. Pencapaian ini didukung oleh program bantuan permodalan dari kementerian Koperasi dan UKM RI.
11. Indikator kinerja jumlah UMKMK yang bermitra dengan lembaga pembiayaan dan BUMN dengan target 17% pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 22,80%. Pencapaian ini didukung melalui kegiatan peningkatan permodalan UMKM dengan lembaga keuangan bank atau non bank dan BUMN / PKBL.
12. Indikator kinerja jumlah koperasi yang berperan dalam sektor riil dengan target 15 unit pada tahun 2011, hingga tahun 2013 telah tercapai sebanyak 30 unit. Pencapaian ini didukung melalui kegiatan

bantuan prasarana dan sarana, bimbingan teknis terhadap koperasi sektor riil.

Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap LAKIP pada tahun 2014, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja dari yang semula berorientasi out put dirubah menjadi orientasi out come atau hasil. Penyempurnaan sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut juga dilakukan terhadap Renstra Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2010-2015, sehingga sasaran strategis dan indikator kinerja disempurnakan untuk target kinerja tahun 2014-2015. Capaian kinerja Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat yang telah direvisi sesuai hasil pembahasan dengan Kementerian PAN dan RB sebagai berikut :

1. Indikator kinerja prosentase koperasi aktif dengan target 70% pada tahun 2014, tercapai sebesar 69,88%. Pencapaian ini tidak mencapai target disebabkan masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan RAT.
2. Indikator kinerja presentase peningkatan tingkat kesehatan USP/KSP dengan target 31% pada tahun 2014 telah tercapai 40,5% pada tahun 2015. Pencapaian ini disebabkan adanya dukungan Kementerian Koperasi dan UKM RI dan disebabkan semakin baiknya pengelolaan usaha simpan pinjam yang sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Indikator kinerja presentase peningkatan tingkat kesehatan USP/KSP dengan target 31% pada tahun 2014 telah tercapai 40,5% pada tahun 2015. Pencapaian ini disebabkan adanya dukungan Kementerian Koperasi dan UKM RI dan disebabkan semakin baiknya pengelolaan usaha simpan pinjam yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Indikator presentase peningkatan volume usaha dengan target 15% pada tahun 2015 dan terealisasi sebesar 9,74%. Pencapaian realisasi yang dibawah target disebabkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi volume usaha koperasi seperti fluktuasi harga sawit, keterbatasan permodalan, inflasi dan tidak adanya bantuan hibah dari pemerintah.
5. Indikator presentase UMKM yang mempunyai legalitas usaha dengan target 35% pada tahun 2014 telah tercapai sebesar 60,4% pada

tahun 2015. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan bantuan sertifikasi halal, bantuan merk, IUMKM

6. Indikator presentase UMKM binaan yang mengakses permodalan ke perbankan /BUMN dengan target 30% pada tahun 2014, tercapai pada tahun 2015 sebesar 9,55%. Penurunan pencapaian ini disebabkan revisi target pada tahun 2015 menjadi sebesar 9%.
7. Indikator presentase UMK yang bermitra dengan target sebesar 40% pada tahun 2015 dengan realisasi sebesar 50,1%. Pencapaian ini disebabkan adanya dukungan kegiatan temu mitra baik di Provinsi maupun di luar provinsi.

Alokasi anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengembangkan koperasi dan UMKM.

Alokasi anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi, UMKM

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PENDAPATAN DAERAH														
Pendapatan Asli Daerah	-	-	8.000.000	8.000.000			29.868.535	8.850.000			373	111		
- Hasil Pajak Daerah														
- Hasil retribusi daerah	10.000.000	12.000.000	-	-	15.540.000	13.820.000			155	115				
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain PAD yang dipisah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bagi hasil Pajak/Bagi hasil bukan pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana alokasi umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pendapatan hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH														
Belanja Tidak Langsung	18.831.046.200	8.963.530.597	7.200.396.385	7.108.930.837	16.957.335.604	6.049.272.372	6.305.021.898	6.788.174.606	90	87	88	95	-	-
- Belanja pegawai														
- Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja tidak terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja langsung	6.589.140.880	6.564.876.030	7.204.641.680	7.534.693.180	5.608.195.337	6.062.303.784	6.525.115.366	6.612.609.405	85	92	91	88	-	-
- Belanja pegawai	712.465.000	626.000.000	378.880.000	-	840.211.000	598.525.000	370.670.000	-	90	96	98	-	-	-
- Belanja barang dan jasa	5.351.320.330	5.492.986.030	6.055.971.680	7.008.493.180	4.474.064.337	5.031.533.784	5.669.153.966	6.116.385.405	84	92	94	87	-	-
- Belanja modal	525.355.550	445.890.000	769.790.000	526.100.000	493.920.000	432.245.000	485.291.400	496.224.000	94	97	63	94	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN														
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Secara umum hasil pelaksanaan kegiatan sektor koperasi dan UMKM dalam 5 tahun terakhir ini sebagaimana diuraikan berikut :

1. Perkembangan Koperasi dan UMKM

Perkembangan koperasi dan UMKM hingga tahun 2015, menunjukkan trend cukup baik dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya 1-2%. Begitu juga halnya dengan jumlah koperasi aktif serta koperasi yang melaksanakan RAT mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2 %, kondisi ini antara lain disebabkan karena pembina di Propinsi dan Kab/Kota selalu berupaya meningkatkan koperasi aktif dan melaksanakan RAT melalui sosialisasi, penyuluhan serta pendampingan kepada koperasi tersebut. Perkembangan koperasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.6
PERKEMBANGAN KOPERASI DI SUMATERA BARAT
TAHUN 2011-2015**

No	Kabupaten/Kota	Koperasi (unit)			Anggota (Orang)			RAT (unit)	
		JML	Aktif	Tidak Aktif	JML	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Kab. Agam	257	196	61	37.127	18.157	18.970	126	
2	Kab. Pasaman	227	105	122	24.951	11.737	13.214	44	
3	Kab. Pasaman Barat	288	256	32	46.110	31.442	14.668	70	
4	Kab. 50 Kota	209	129	80	40.198	29.703	10.495	90	
5	Kab. Solok	155	75	80	24.984	18.022	6.962	59	
6	Kab. Solok Selatan	130	63	67	5.883	3.208	2.675	36	
7	Kab. Padang Pariaman	245	184	61	25.499	11.236	14.263	77	
8	Kab. Pess. Selatan	295	183	112	19.234	9.361	9.873	66	
9	Kab. Tanah Datar	229	206	23	38.396	17.229	21.167	122	
10	Kab. Sijunjung	177	68	109	30.739	14.595	16.144	61	
11	Kab. Dharmasraya	200	108	92	37.866	27.219	10.647	52	
12	Kab. Kep. Mentawai	124	21	103	6.341	5.570	771	14	
13	Kota Bukittinggi	103	85	18	16.945	8.420	8.525	54	
14	Kota Padang	702	648	54	116.133	65.114	51.019	333	
15	Kota Sawahlunto	78	63	15	9.114	4.198	4.916	45	
16	Kota Padang Panjang	77	54	23	8.156	3.631	4.525	43	
17	Kota Solok	64	48	16	10.199	4.802	5.397	36	
18	Kota Payakumbuh	153	123	30	18.335	8.312	10.023	65	
19	Kota Pariaman	82	60	22	8.692	4.291	4.401	43	
	JUMLAH	3.795	2.675	1.120	524.902	296.247	228.655	1.436	
B. Prop. Sumbar									
1	Koperasi Sekunder	26	20	6	5.142	2.789	2.353	8	
2	Koperasi Primer	71	28	43	5.008	3.445	1.563	2	
	Jumlah	97	48	49	10.150	6.234	3.916	10	
	Total	2015	3.892	2.723	1.169	535.052	302.481	232.571	1.446
		2014	3.807	2.628	1.179	516.348	287.642	228.706	1.513
		2013	3.747	2.641	1.106	545.288	267.562	277.726	1.526
		2012	3.789	2.628	1.161	544.430	299.808	244.622	1.471
		2011	3.743	2.482	1.261	543.685	280.068	263.617	1.450

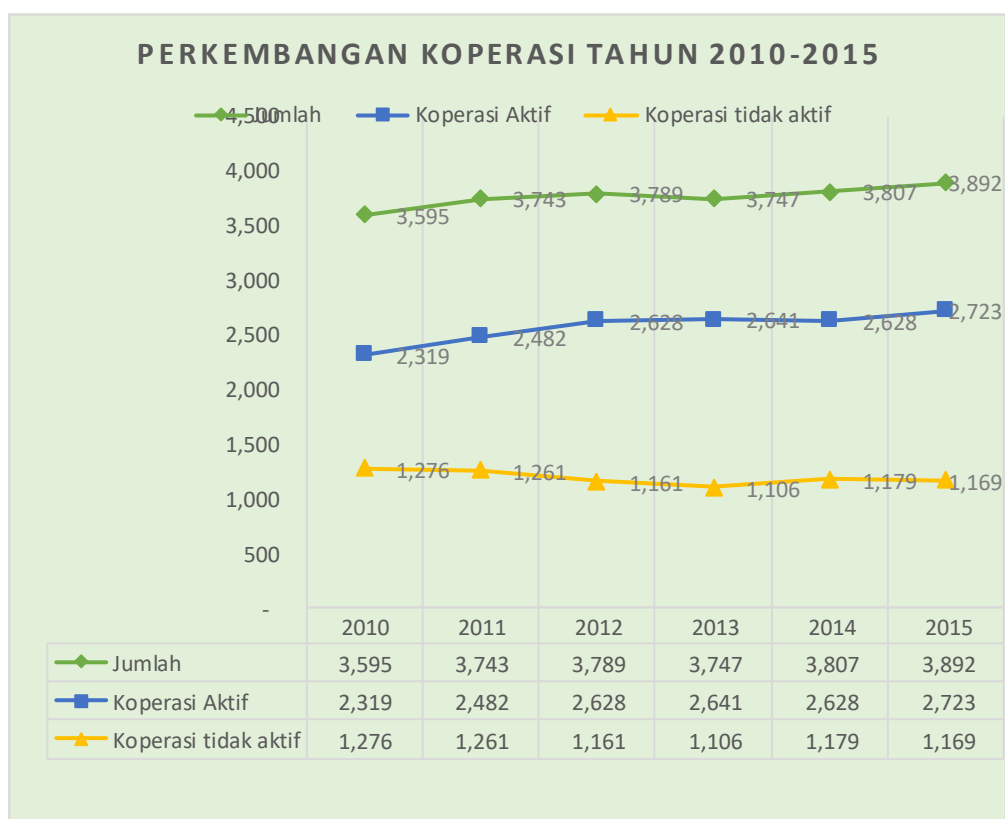
Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota se Sumbar

Jumlah koperasi di Sumatera Barat pada tahun 2015 sebanyak 3.892 unit dengan rincian koperasi aktif sebanyak 2.723 unit dan koperasi tidak

aktif sebanyak 1.169 unit. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat selalu berupaya menurunkan jumlah koperasi tidak aktif. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain penyuluhan terhadap koperasi tidak aktif di Kab/Kota, pendampingan kepada koperasi yang tidak aktif. Dalam tahun 2016 direncanakan akan dilakukan upaya peningkatan persentase koperasi aktif melalui pembubaran terhadap koperasi primer dan sekunder propinsi.

Perkembangan koperasi aktif dan anggota koperasi selama periode 2011-2015 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1. Perkembangan Koperasi aktif dan anggota koperasi tahun 2011-2015



Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota se Sumbar

Faktor-faktor pendukung maju suatu koperasi adalah modal, asset, volume usaha dan SHU. Perkembangan modal sendiri, modal luar dan asset koperasi dari tahun 2011-2016 cukup mengalami peningkatan. Namun apabila dilihat dari segi volume usaha dan SHU terlihat bahwa pada tahun 2011-2014 terdapat peningkatan volume usaha dan SHU sedangkan tahun 2015 sedikit mengalami penurunan.

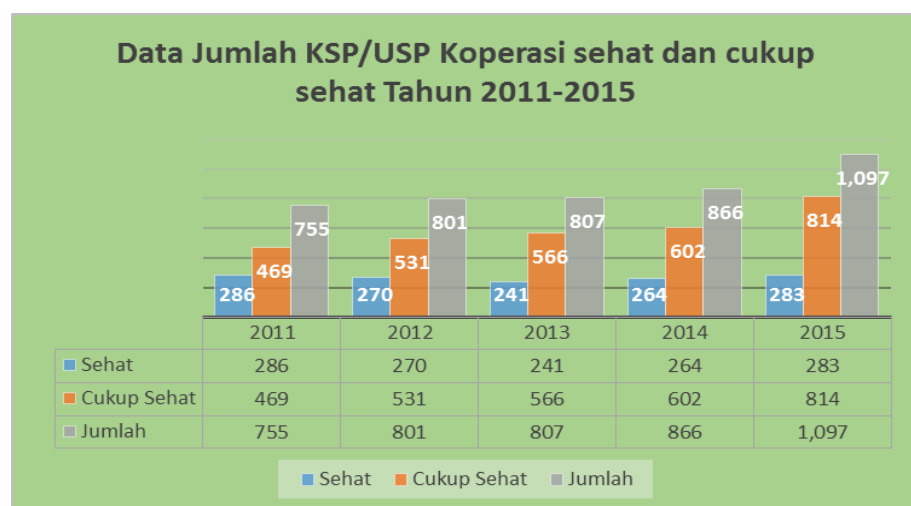
Faktor penyebab rendahnya volume usaha dan SHU koperasi adalah : 1) terjadinya inflasi pada tahun 2015 yang berakibat produk pertanian/perkebunan mengalami penurunan harga; 2) sesuai evaluasi Kemendagri bantuan modal dan sarana usaha bagi koperasi yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebijakan bantuan hibah kepada masyarakat; 3) peningkatan hasil produk koperasi yang bergerak di sektor ril dipengaruhi oleh tingkat persaingan dan harga pasar yang kompetitif.

Perkembangan kinerja usaha koperasi selama periode tahun 2011-2015 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari perkembangan modal, volume usaha dan SHU. Pertumbuhan modal sendiri rata-rata sebesar 15 % dan modal luar rata-rata sebesar 4,5 %. Pertumbuhan volume usaha rata-rata sebesar 3,9 % dan SHU rata-rata sebesar 0,5 %.

Dari tingkat kesehatan usaha simpan pinjam, juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini disebabkan makin meningkatnya pemahaman pengelola usaha simpan pinjam koperasi tentang aturan simpan pinjam.

Perkembangan tingkat kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2. Tingkat Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi/KSP Tahun 2011-2015



Perkembangan modal, asset, volume usaha dan SHU pada Propinsi Sumatera Barat tahun 2011- 2015 terlihat pada tabel dibawah ini :

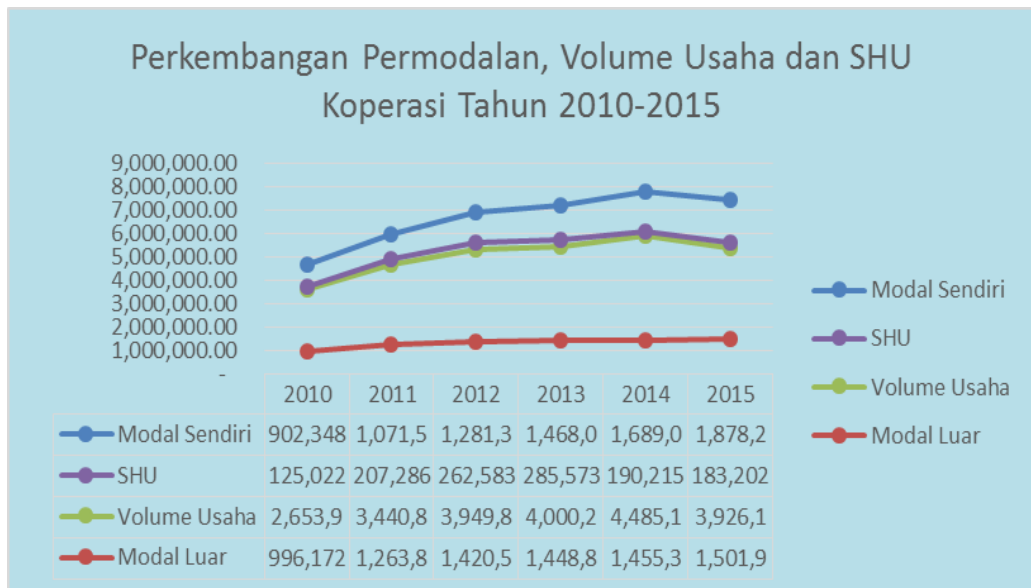
Tabel 2.7
PERKEMBANGAN MODAL, ASSET,
VOLUME USAHA DAN SHU KOPERASI DI SUMATERA BARAT
TAHUN 2011 – 2015

No	Kabupaten/Kota	Modal Sendiri (Rp. Juta)	Modal Luar (Rp. Juta)	Asset (Rp. Juta)	Volume Usaha (Rp. Juta)	S H U (Rp. Juta)	
1	2	17	18		19	20	
1	Kab. Agam	170.992,41	218.779,67	389.772,08	310.212,95	11.422,19	
2	Kab. Pasaman	66.882,20	29.640,53	96.522,73	93.646,67	3.442,93	
3	Kab. Pasaman Barat	65.763,69	44.457,94	110.221,63	252.437,98	8.586,71	
4	Kab. 50 Kota	128.544,54	91.766,03	220.310,56	151.340,53	8.584,87	
5	Kab. Solok	52.048,17	40.928,29	92.976,46	46.418,44	5.045,57	
6	Kab. Solok Selatan	29.601,46	29.159,98	58.761,44	58.415,55	1.382,64	
7	Kab. Padang Pariaman	97.668,82	61.792,02	159.460,84	159.473,02	13.264,38	
8	Kab. Pess. Selatan	94.251,87	71.997,26	166.249,13	254.539,94	8.975,77	
9	Kab. Tanah Datar	172.299,38	58.704,42	231.003,80	232.266,73	15.567,89	
10	Kab. Sijunjung	49.716,92	82.077,31	131.794,23	106.725,82	4.678,35	
11	Kab. Dharmasraya	58.672,79	79.983,71	138.656,49	367.939,67	5.668,42	
12	Kab. Kep. Mentawai	6.045,12	1.514,37	7.559,49	3.133,51	348,48	
13	Kota Bukittinggi	155.433,64	71.584,98	227.018,62	167.106,05	7.787,03	
14	Kota Padang	468.981,20	449.020,75	918.001,95	1.259.677,12	65.518,59	
15	Kota Sawahlunto	35.131,80	38.855,93	73.987,72	111.586,38	3.809,61	
16	Kota Padang Panjang	38.358,48	39.615,06	77.973,54	46.359,43	4.283,47	
17	Kota Solok	43.262,15	48.107,21	91.369,35	65.715,02	4.956,98	
18	Kota Payakumbuh	102.398,74	22.277,44	124.676,18	177.256,94	5.832,74	
19	Kota Pariaman	34.905,59	19.370,37	54.275,96	36.290,71	2.725,18	
	JUMLAH	1.870.958,93	1.499.633,26	3.370.592,19	3.900.542,45	181.881,80	
B. Prop. Sumbar							
1	Koperasi Sekunder	6.252,38	1.603,90	7.856,28	23.816,38	828,01	
2	Koperasi Primer	1.040,00	714,00	1.754,00	1.831,00	492,26	
	Jumlah	7.292,38	2.317,90	9.610,28	25.647,38	1.320,27	
	Total	2015	1.878.251,31	1.501.951,16	3.380.202,47	3.926.189,83	183.202,07
		2014	1.689.080,86	1.455.371,63	3.144.452,49	4.485.154,05	190.215,29
		2013	1.468.067,84	1.448.868,03	2.916.935,87	4.000.252,10	285.573,36
		2012	1.281.315,22	1.420.513,10	2.701.828,32	3.949.805,41	262.583,24
		2011	1.071.570,86	1.263.809,60	2.335.380,46	3.440.827,33	207.286,63

Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota se Sumbar

Selanjutnya perkembangan kinerja usaha koperasi dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik3. Perkembangan Modal, Volume Usaha, Aset dan SHU Koperasi tahun 2011-2015



Sumber data : Dinas Koperasi dan UMKM Kab/Kota se Sumbar

Jumlah UMKM menurut Sensus ekonomi 2006 berjumlah 501.410 unit, yang terdiri dari mikro sebanyak 423.280 unit, kecil sebanyak 74.410 unit, dan menengah sebanyak 3.720 unit.

UMKM Unggulan di Provinsi Sumatera Barat dengan produk antara lain :

- Makanan ringan dan minuman (Rendang, produk makanan ringan dari umbi-umbian)
- Songket
- Sulaman dan bordiran

Potensi lain yang perlu kita perhatikan adalah:

- Kopi yang di produksi di Kabupaten Pasaman (kopi matahari dan kopi gunung pasaman), Kopi di Kab. Solok, Kab. Solok Selatan dan Kab. Pesisir Selatan.
- Kacang Tanah.
- Produksi kacang tanah tersebut di beberapa kabupaten seperti Pasaman, Agam (matur), Tanah Datar dan Kab. Solok Selatan.
- Songket. (Kab. Tanah datar/pandai sikek, Kab. Limapuluh Kota/ Halaban dan Kubang, Kota Sawahlunto/Silungkang, Kab. Sijunjung/Unggan)

- Sulaman (Kab. Pesisir selata/ sulaman bayangan, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman)

Dalam rangka pemberdayaan UMKM pemerintah Propinsi Sumatera Barat, telah menyalurkan bantuan perkuatan modal bagi PKL dari tahun 2008 sampai tahun 2014. Jumlah PKL yang telah diregister dan dibantu perkuatan modal melalui koperasi sebanyak 12.875 PKL melalui 179 Koperasi dengan total bantuan sebesar Rp 11,118 milyar.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, antara lain : pengembangan UMKM kawasan pariwisata/kawasan agribisnis, pembinaan Sentra/Kawasan produk kerajinan UMKM, bantuan Pendaftaran Merk/Halal, Haki, Promosi melalui pameran dan media on line, penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil, mendorong dan memfasilitasi akses KUR, Registrasi PKL, bantuan Kemasan dan Branding produk, pelatihan bagi UMKM, dll.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM

Tantangan pengembangan koperasi dan UMKM ke depan antara lain yaitu menjadikan koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah. Hal ini membutuhkan dukungan kebijakan dan keberpihakan terhadap pengembangan koperasi dan UMKM. Keberpihakan bagi koperasi dan UMKM bertujuan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan semangat berkoperasi di kalangan masyarakat. Disamping itu, koperasi harus bisa mandiri, mengingat koperasi memiliki prinsip partisipasi, kebersamaan dan kemandirian. Untuk itu perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, gerakan koperasi, Dekopinwil dan pemangku kepentingan lainnya.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi ,UKM Provinsi Sumatera Barat juga diidentifikasi dari faktor eksternal seperti sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota. Komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat terhadap Renstra Kabupaten/Kota dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM terhadap
Renstra Kab/Kota dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD	Sasaran pada Renstra Kab/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Presentase koperasi aktif	Meningkatnya koperasi aktif	Meningkatnya koperasi aktif	Meningkatnya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM
2.	Presentase peningkatan usaha simpan pinjam	Meningkatnya tingkat kesehatan USP/KSP	Meningkatnya tingkat kesehatan USP/KSP	Meningkatnya kelembagaan koperasi
3.	Presentase peningkatan volume usaha	Meningkatnya volume usaha koperasi	Meningkatnya volume usaha koperasi	Meningkatnya perkembangan produk dan pemasaran koperasi
4.	Presentase UMKM Binaan yang mempunyai legalitas usaha	Meningkatnya UMKM binaan yang mempunyai legalitas usaha	Meningkatnya UMKM binaan yang mempunyai legalitas usaha	Meningkatnya daya saing UMKM binaan
5.	Presentase UMKM yang mengakses permodalan ke perbankan / BUMN	Meningkatnya UMKM yang mengakses permodalan ke perbankan/BUMN	Meningkatnya UMKM yang mengakses permodalan ke perbankan/BUMN	Meningkatnya akses pada sumber daya produktif
6.	Presentase UMKM yang bermitra	Meningkatnya UMKM yang bermitra	Meningkatnya UMKM yang bermitra	Meningkatnya pemasaran UMKM yang bermitra

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang dimiliki, maka tantangan dan peluang pelayanan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat lima tahun ke depan sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

1. Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi koperasi dan UMKM
 - Jumlah koperasi dan UMKM yang cukup besar ini menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi anggota koperasi dan pelaku-pelaku UMKM serta kelompok-kelompok produktif lainnya
 - Jumlah koperasi dan UMKM yang cukup besar ini menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan peran koperasi dalam mewujudkan kegiatan usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif anggota.
1. Peningkatan usaha koperasi dan UMKM

- Pertumbuhan volume usaha koperasi menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM, karena masih rendahnya kinerja usaha koperasi sektor riil.
2. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM
 - Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat baik dari segi kelembagaan maupun produk yang dihasilkan koperasi dan UMKM.
 3. Peningkatan skala usaha UMKM
 - Pertumbuhan UMKM menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumbar karena sulitnya tumbuh usaha mikro menjadi usaha skala yang lebih besar atau naik kelas.

2.4.2 Peluang

1. Peningkatan tata kelola kelembagaan organisasi koperasi dan UMKM
 - Nilai-nilai dan prinsip koperasi dapat menjadikan koperasi maju dan mampu membantu anggotanya melalui upaya kolektif yang produktif, efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. Peningkatan usaha koperasi dan UMKM
 - Kebersamaan dalam pengelolaan koperasi akan mengurangi resiko persaingan antara anggota, meningkatkan posisi tawar terhadap pihak eksternal dan menghasilkan manfaat yang adil.
3. Peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM
 - Dengan adanya pasar bebas atau globalisasi perekonomian dunia akan menjadi peluang bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing.
4. Peningkatan skala usaha UMKM
 - Globalisasi dan era digital merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh UMKM dalam mengembangkan usaha.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja KUMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja KUMKM tersebut disebabkan terutama oleh keterbatasan kemampuan KUMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan faktor produksi.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan, antara lain, oleh (1) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2) proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3) lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan (4) masih munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk pengenaan pungutan-pungutan baru kepada Koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Masih terbatasnya sumber daya financial juga merupakan masalah utamabagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro ini sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan.

Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi adalah masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling

benar (best practices). Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan, terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Sesuai dengan Permendagri Nomor. 54 Tahun 2010, dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi memerlukan beberapa informasi antara lain : hasil analisa gambaran pelayanan SKPD dan hasil analisis komparasi Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Analisa Gambaran Pelayanan SKPD	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	IKK	Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi	Persaingan usaha	Masih terbatasnya jumlah SDM yang kompeten tentang perkoperasian
	Meningkatnya volume usaha koperasi	IKK	Masih rendahnya kualitas, produktifitas dan pemasaran produk koperasi	Perdagangan bebas	<ul style="list-style-type: none"> • Data koperasi yang belum akurat dan update • Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan kinerja usaha koperasi
	Meningkatnya permodalan koperasi	IKK	Pemupukan modal sendiri dan kerjasama	Lembaga keuangan formal lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Data koperasi yang belum akurat dan

			dengan lembaga keuangan lainnya belum optimal		update <ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan permodalan koperasi
	Meningkatnya daya saing dan pemasaran produk UMKM		Masih rendahnya kemampuan manajerial dan kewirausahaan UMKM	Globalisasi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan pembiayaan, pemasaran, standarisasi bagi UMKM • Masih terbatasnya kompetensi pelaku UMKM
Hasil analisa Renstra K/L dan Renstra Provinsi	Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian		Peran koperasi dan UMKM belum optimal dalam perekonomian	Iklm usaha yang lebih berpihak kepada koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya SDM yang kompeten dalam pembinaan koperasi dan UMKM • Masih terbatasnya bantuan dan fasilitasi dalam peningkatan pembiayaan, pemasaran, standarisasi bagi UMKM
	Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM		Masih rendahnya daya saing koperasi	Perdagangan bebas	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya bantuan dan

			dan UMKM		fasilitasi dalam peningkatan pembiayaan, pemasaran, standarisasi bagi KUMKM
--	--	--	----------	--	---

Disamping permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, dalam pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM juga perlu memperhatikan perkembangan baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional.

Identifikasi permasalahan di tingkat regional, nasional dan internasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
1	Globalisasi perdagangan (khususnya AEC)	Daya saing Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand	Daya saing Sumatera Barat masih dibawah...
2	Koperasi berstandar internasional	Koperasi nasional belum banyak yang berkelas internasional	Koperasi di Sumatera Barat belum ada yang termasuk koperasi skala besar tingkat internasional
3	Pertumbuhan ekonomi dunia	Pertumbuhan ekonomi nasional	Peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah : Terwujudnya Sumatera Barat Madani dan Sejahtera

Misi pembangunan jangka menengah daerah ini ditetapkan sejalan dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkharakter, dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Sumberdaya	Masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan administrasi sesuai aturan yang berlaku.	Masih terbatasnya kemampuan pengurus dan pengelola koperasi.	Komitmen dari pemerintah provinsi dan kab/kota untuk melakukan pembinaan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi koperasi.
		Masih banyaknya KSP yang belum	Masih terbatasnya kemampuan	Komitmen dari pemerintah

Pembangunan Daerah Program : 1. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 2. Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi 3. Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM	memahami aturan simpan pinjam koperasi.	pengurus dan pengelola koperasi.	provinsi dan kab/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap USP - Kop/KSP
	Masih rendahnya penerapan sistem berbasis IT pada KUMKM	Masih terbatasnya kualitas SDM KUMKM dalam penguasaan IT.	Dukungan program tata kelola koperasi berbasis sistem informasi teknologi
	Masih terbatasnya jangkauan pemasaran produk KUMKM.	Masih kurangnya pelatihan pemanfaatan teknologi informasi pemasaran dan terbatasnya akses pemasaran	Dukungan pemerintah provinsi dan kab/kota dalam peningkatan akses pemasaran produk KUMKM
	Masih rendahnya daya saing produk KUMKM.	Masih terbatasnya kemampuan KUMKM dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan	Dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota dalam peningkatan kualitas produk KUMKM
	Masih terbatasnya permodalan dan akses KUMKM ke sumber daya produktif.	Masih banyaknya KUMKM yang belum bankable.	Dukungan pemerintah provinsi dan kab/kota dalam memberikan jaminan kredit, pemupukan modal sendiri dan peningkatan akses ke lembaga keuangan lainnya.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2020 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi presiden terpilih periode 2014-2019 sebagaimana tertuang didalam RPJMN 2015-2019 yaitu “ Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong “. Pencapaian visi presiden tersebut oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan misi pembangunan nasional, yaitu : mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma pembangunan yang difokuskan pada :

- perbaikan kualitas hidup masyarakat
- pengurangan ketimpangan
- peningkatan produktifitas rakyat lapisan menengah bawah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Pelaksanaan misi dan norma-norma pembangunan diharapkan dapat membangun dimensi pemerataan dan kewilayahan yang mencakup dimensi pembangunan yang inklusif dan dapat memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan dan kesenjangan antar wilayah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan Kementerian Koperasi dan UKM , yaitu “ Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirain, koperasi dan keterpaduan.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2015-2019 dilakukan melalui upaya-upaya, antara lain:

1. peningkatan kompetensi UMKM dalam kewirausahaan dan inovasi, teknik produksi dan pengelolaan usaha, serta pemasaran didalam dan luar negeri.
2. peningkatan kemandirian koperasi melalui penguatan jati dirinya
3. peningkatan jangkauan, skema dan kualitas layanan sistem pendukung koperasi dan UMKM terkait diklat, pembiayaan, pendampingan usaha, layanan teknologi dan informasi, intermediasi pasar dan kemitraan.

4. penguatan koperasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal diberbagai sektor perekonomian dan lapisan sosial dan ekonomi masyarakat
5. penguatan kaderisasi koperasi terutama dikalangan generasi muda dan kelompok produktif lainnya
6. peningkatan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan dan perbaikan peraturan dan kebijakan, kemudahan perizinan serta peningkatan kesempatan, kepastiaan dan perlindungan usaha
7. peningkatan keterpaduan kebijakan lintas instansi dan pusat daerah yang didukung peran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan, Sasaran, arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM RI dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.4
Tujuan, sasaran, Strategi, Arah Kebijakan
Kementerian Koperasi dan UKM RI

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terciptanya koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berasal dari pelaku Koperasi dan UMKM	Meningkatkan produktifiitas, kelayakan dan nilai tambah UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (naik kelas) dan berdaya saing	Peningkatan kualitas sumber daya manusia
	Meningkatnya jumlah, skala dan kapasitas usaha koperasi dan UMKM		Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan pelaku UMKM		Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
Terwujudnya koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja Koperasi yang profesional, kredibel dan akuntabel		Penguatan kelembagaan usaha
	Terwujudnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri		Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
	Meningkatnya UMKM dalam berkontribusi pada perekonomian daerah dan nasional		
	Meningkatnya Koperasi dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat		
Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang profesional dan berkinerja tinggi	Kapasitas organisasi Kementerian Koperasi dan UKM		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032 yang menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana struktur ruang wilayah Provinsi serta penetapan kawasan strategis Provinsi, maka dalam penyusunan kebijakan koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat senantiasa memperhatikan potensi daerah yang ada dan kawasan-kawasan strategis untuk mengoptimalkan peran koperasi dan UMKM dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Telaahan terhadap struktur dan pola ruang provinsi tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah: "Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan"

Untuk mencapai tujuan tersebut diterapkan beberapa kebijakan berdasarkan potensi dan permasalahan penataan ruang wilayah, diantaranya:

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah utara dan selatan serta pusat dan pinggiran (*central and fringe area*);
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder, dan tersier sesuai daya dukung wilayah;
3. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
4. Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi Kota Metropolitan;
5. Penetapan dan Peningkatan Kota Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan, dan Simpang Empat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Painan, Lubuk Alung, Parik Malintang, Lubuk Basung, Lubuk Sikaping, Sarilamak, Kota Padang Panjang, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Aro Suka, Padang Aro, dan Tuapejat untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
6. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
7. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan; dan
8. Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah.

KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Program dan kegiatan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat tidak ada yang berimplikasi negatif secara langsung terhadap lingkungan hidup.

Tabel 3.5
Telaahan RTRW dan KLHS terkait Pelayanan Dinas Koperasi, UKM
Provinsi Sumatera Barat

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Implikasi RTRW	Tidak terdapat permasalahan karena Dinas Koperasi dan UMKM merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, berpedoman pada RTRW	1.RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dalam RTRW baru sampai muatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Dukungan penataan kawasan ekonomi strategis dalam pembangunan koperasi dan UMKM
2.	Implikasi KLHS	Tidak terdapat program kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis sesuai dengan hasil telaahan permasalahan internal dan eksternal sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan 5 kriteria dan bobot criteria sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	25
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD	25
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
	Total	100

Penentuan criteria dan pembobotan criteria pada tabel di atas akan dilakukan penilaian untuk masing-masing isu strategis dengan skala criteria 1 sampai dengan 5 sehingga bisa diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis. Nilai total dari isu strategis tersebut selanjutnya akan dihitung rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat diurutkan nilai rata-rata isu strategis dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berdasarkan nilai isu strategis tersebut dapat ditentukan prioritas isu strategis untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program.

Nilai Skala kriteria Isu-Isu strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
		0.25	0.25	0.20	0.15	0.15	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kualitas kelembagaan koperasi perlu ditingkatkan	5	5	4	4	4	4.50
2	Kinerja usaha koperasi sektor riil dan usaha simpan pinjam koperasi perlu ditingkatkan	5	5	4	4	3	4.35
3	SDM koperasi dan UMKM perlu ditingkatkan	4	5	4	3	3	3.95
4	Akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM perlu ditingkatkan	4	4	4	4	3	3.75
5	Kapasitas usaha dan daya saing UMKM perlu ditingkatkan	5	5	3	4	3	4.35
6	Database koperasi dan UMKM perlu ditingkatkan agar lebih akurat, update dan valid	5	5	3	3	4	4.15
7	Globalisasi perdagangan khususnya AEC	4	4	3	3	3	3.50
8	Koperasi skala besar berskala nasional	4	4	3	4	4	3.80
9	Pengembangan produk unggulan daerah yang dikelola koperasi	5	5	3	3	3	4.00
10	Kualitas infrastruktur perlu ditingkatkan	3	3	4	3	3	3.20

Sesuai dengan hasil scoring pada tabel di atas, dapat ditentukan lima isu strategis utama yaitu :

1. Kualitas kelembagaan koperasi perlu ditingkatkan

2. Kinerja usaha koperasi sektor riil dan usaha simpan pinjam koperasi perlu ditingkatkan
3. Kapasitas usaha dan daya saing UMKM perlu ditingkatkan
4. Database koperasi dan UMKM perlu ditingkatkan agar lebih akurat, update dan valid
5. Pengembangan produk unggulan daerah yang dikelola koperasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat 2 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 111 menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

1. Pendahuluan
2. Gambaran dan Pelayanan Perangkat Daerah
3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat daerah
4. Tujuan dan Sasaran
5. Strategi dan Arah Kebijakan
6. Rencana Program Kegiatan serta Pendanaan
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
8. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pada Revisi Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 pada bab IV hanya memuat, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diturunkan dari Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat yang dimuat dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 adalah :

“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan focus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan ***sense of participation and sense of***

belonging maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 dalam bentuk 5 (lima) misi. Tujuan pembangunan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat berada pada misi ke-4 yaitu “ *Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah*”. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sector unggulan daerah dan memanfaatkan sumber daya local untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.1.1. Tujuan

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan serta selaras dengan tujuan satu pada misi keempat RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 yaitu Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah, maka dirumuskanlah tujuan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Target Capaian Setelah Perubahan

NO	TUJUAN	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat melalui Peran Koperasi dan UKM
2	Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	-
3	Terwujudnya Dinas Koperasi, UMKM yang berkinerja baik	Meningkatnya kinerja organisasi

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Prov Sumatera Barat

4.1.2. Sasaran

Tujuan yang akan diwujudkan tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi koperasi dan UMKM yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Berdasarkan evaluasi Tim Penilai SAKIP Provinsi Sumatera Barat dari KemenPAN RB, maka sasaran dan indicator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mengalami perubahan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perubahan Sasaran dan Target Pencapaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET					
				1	2	3	4	5	6
Sebelum Perubahan									
1	Meningkatnya daya saing dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah	Meningkatnya nilai aset koperasi	%	8	8,5	8,75	9	9,5	10
		Meningkatnyanilai omset koperasi	%	7	7,5	8,25	8,75	9,5	10
		Meningkatnya skala usaha UKM Binaan	%	1,2	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1
2	Meningkatnya kapasitas organisasi Dinas Koperasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Kategori	B	B	BB	BB	BB	BB
		Capaian realisasi fisik pengelolaan program/kegiatan	%	100	100	100	100	100	100
		Capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan	%	95	95	96	96	96	96
Setelah Perubahan									
1	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	%	-	8,5	9	9,5	10	10,5
		Persentase peningkatan nilai omset koperasi	%	-	7,5	8	8,5	9	9,5
		Persentase koperasi aktif	%	-	-	77,5	78	78,5	79
		Persentase UKM Binaan Naik Kelas	%	-	-	1,7	1,7	1,7	1,7
		Laju pertumbuhan kredit UKM	%	-	-	8	8	8	8
2	Meningkatnya kinerja organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Kategori	B	B	BB	BB	BB	BB
		Capaian realisasi fisik pengelolaan program/kegiatan	%	100	100	100	100	100	100
		Capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan	%	95	95	96	96	96	96

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Tabel 4.3
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN	
		Uraian	Indikator
1	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat melalui Peran Koperasi dan UKM	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UKM	Persentase peningkatan nilai aset koperasi
			Persentase peningkatan nilai omset koperasi
			Persentase koperasi aktif
			Persentase UKM Binaan Naik Kelas
			Laju pertumbuhan kredit UKM
2	Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatnya tatakelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja
			Capaian realisasi fisik pengelolaan program/kegiatan
			Capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan

Sumber : Dinas Koperasi, UKM

Tabel 4.4

Pencapaian Sasaran Strategis sesuai Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	TARGET					
			1	2	3	4	5	6
Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya nilai aset koperasi			8,5%	8.75%	9%	9,5%	10%
		Koperasi aktif	71%	71,8 %	72,6%	73,4 %	74,2%	75%
		Jumlah anggota	6%	6,25%	6,5%	6,75 %	7%	7,25 %
		Tindak lanjut rekomendasi pengawasan dan pemeriksaan	-	50 Koperasi	55 Kop	60 Kop	65 Kop	70 Kop
		Meningkatnya nilai omset koperasi	7,5%	7,5%	7,75%	9,5%	9,75%	10%
		Pertumbuhan volume usaha koperasi riil						
		Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam						
		Pertumbuhan permodala						

		n usaha koperasi						
	Meningkatnya skala usaha UKM		0,5 %	0,5%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%
		Meningkatnya usaha kecil menjadi usaha menengah	1,2%	1,2%	2%	2%	2%	2%
		Meningkatnya kemitraan usaha UKM	5 Kemitraan/Mou	5 Kemitraan/Mou	5 Kemitraan/Mou	5 Kemitraan/Mou	5 Kemitraan/Mou	5 Kemitraan/Mou
		Meningkatnya keunggulan kompetitif UKM terstandarisasi	40 UKM	40 UKM	40 UKM	40 UKM	40 UKM	40 UKM
Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja		B	B	BB	BB	BB	BB
		Capaian realisasi fisik pengelolaan program/kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian realisasi keuangan pengelolaan program/keuangan	95%	95%	96%	96%	97%	97%

4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang koperasi dan UKM.

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi, ditetapkanlah strategi Pembangunan yang merupakan arah yang akan dilalui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang merupakan upaya untuk mengoptimalkan kekuatan dalam memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan/ancaman, mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang dan mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan/ancaman

Dalam rangka mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, beberapa strategi dan kebijakan yang secara operasional ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hubungan hirarkis antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Kebijakan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Koperasi serta UKM Dalam Mengelola Potensi Ekonomi Daerah	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat melalui Peran Koperasi dan UKM	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UKM	Meningkatkan tatakelola koperasi yang sesuai jati diri koperasi, berbasis sistem informasi	Peningkatan penyuluhan, pendampingan, diklat serta pengawasan
				Meningkatkan produktifitas, manajemen usaha, permodalan, pembiayaan anggota dan SDM pengelola dan pembina Koperasi	Peningkatan kapasitas usaha koperasi pertanian, non pertanian dan aneka usaha serta kemitraan, promosi, jaringan pemasaran

					serta pemupukan modal sendiri
				Meningkatkan kompetensi manajerial, standarisasi dan perkuatan produk, akses pembiayaan dan pemasaran produk UKM	Peningkatan penyelenggaraan diklat, pendampingan, fasilitasi standarisasi produk, akses permodalan, promosi, kemitraan serta pemasaran produk UKM
2	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Koperasi, UKM	Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatnya tatakelola organisasi	Meningkatkan kinerja pencapaian fisik dan keuangan serta kepuasan masyarakat	Penyempurnaan manajemen pelaporan, keuangan serta kualitas pelayanan publik

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Uraian Singkat

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi dan penjabaran Visi dan Misi, serta sesuai dengan Strategi dan Kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan pada Bab V diatas, serta berdasarkan perhitungan yang realistis terhadap kemampuan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat ditetapkan pilihan program prioritas yang akan dilaksanakan. Program prioritas tersebut diupayakan memiliki daya mampu untuk mendorong dan menggerakkan program lainnya yang digariskan dalam Program Pembangunan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat.

Program yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sama dengan program yang tertuang pada Renstra sebelum perubahan, hanya menambah beberapa kegiatan yang menunjang pelayanan Mess UPTD Balatkop dan PLUT, dengan kegiatan-kegiatan pokok yang diuraikan sebagaimana berikut :

1. *Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan*

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Pembenahan koperasi tidak aktif
- b. Pemasarakatan perkoperasian bagi pemangku kepentingan
- c. Penilaian koperasi berprestasi/koperasi award
- d. Revitalisasi kelembagaan koperasi
- e. Pembubaran koperasi primer dan sekunder provinsi yang tidak aktif
- f. Penilaian dan usulan tanda penghargaan bagi tokoh koperasi
- g. Sosialisasi perkoperasian dilokasi TMMD/N
- h. Penyuluhan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif
- i. Bimtek pengembangan koperasi berkualitas
- j. Sertifikasi pengelola koperasi
- k. Bimtek peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian
- l. Pembinaan kelembagaan koperasi
- m. Peningkatan pelayanan izin usaha simpan pinjam koperasi
- n. Sosialisasi dan peningkatan peran koperasi dalam pengembangan kelompok usaha strategis
- o. Bimtek pembuatan akta anggaran dasar koperasi dan PAD bagi pembina dan pengurus koperasi

- p. Sosialisasi peraturan dan sanksi bagi koperasi
- q. Bimtek pengawasan koperasi bagi pejabat pengawas
- r. Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan koperasi
- t. Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi
- u. Pelatihan Teknis penghitungan Pajak bagi Koperasi
- v. Pelatihan Penilaian kesehatan Simpan Pinjam bagi Pembina
- w. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pembina tentang Koperasi
- x. Pelatihan Akuntansi bagi pengurus/pengelola Koperasi
- y. Sinkronisasi program dan Kegiatan pelatihan Perkoperasian dan UMKM
- z. Pelatihan Bisnis Plan bagi Koperasi
- aa. Pelatihan Penataan kelembagaan Koperasi di sektor riil
- bb. Pelatihan Penerapan Manajemen Resiko bagi pengurus KSPPS/USPPS
- cc. Pelatihan Perkoperasian bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- dd. Pelatihan Manajerial bagi KSP PS/USP PS
- ee. Pelatihan Standar Kompetensi Ritel Koperasi
- ff. Pelatihan Standar Kompetensi bagi pengelola KJK
- gg. Pelatihan Pengawasan Koperasi bagi Aparatur
- hh. Pelatihan SKU bagi Pengelola Koperasi
- ii. Pelatihan Manajemen Usaha Koperasi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi
- jj. Pelatihan Penataan Kelembagaan dan Prosedur Pengsahan Akta Koperasi bagi
- kk. Pelatihan Penyelenggaraan RAT bagi Pembina dan Pengurus Koperasi
- ll. Pembinaan dan pelaksanaan pemberian izin usaha simpan pinjam koperasi
- mm. Pembinaan dan pelaksanaan pemberian izin pembukaan kantor cabang koperasi
- nn. Penilaian Koperasi Simpan Pinjam Award
- oo. Pelatihan pengawas koperasi bagi pejabat pengawas
- pp. Koordinasi peningkatan kualitas SDM KUKM dengan kab/kota
- qq. Familiarization trip berbasis koperasi
- rr. Penyusunan Ranperda pembangunan dan pengembangan koperasi dan UKM
- ss. Peningkatan pelayanan Mess UPTD

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Pembinaan Peningkatan daya saing Koperasi/KUD sektor Pertanian
- b. Revitalisasi Usaha Koperasi Pertanian
- c. Peningkatan Usaha Ritel Koperasi
- d. Koordinasi Pembinaan Usaha Koperasi Pengelola Pasar dan Pengelola Pasar rakyat

- e. Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui Koperasi
- f. Pembinaan Usaha Koperasi melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)
- g. Pembinaan Koperasi sektor Riil menjadi Skala Besar
- h. Pembinaan Usaha Koperasi sektor Pariwisata
- i. Pembinaan Usaha Koperasi Kawasan Agrobisnis
- j. Peningkatan peranan koperasi sektor aneka usaha
- k. Peningkatan dan evaluasi permodalan koperasi
- l. Peningkatan peran usaha simpan pinjam koperasi pola syariah
- m. Pembinaan pelaksanaan usaha simpan pinjam koperasi
- n. Pembinaan pengawasan dan pemeriksaan usaha simpan pinjam koperasi
- o. Pembinaan pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi
- p. Fasilitasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dana bergulir
- q. Fasilitasi penyertaan modal pemerintah bagi koperasi
- r. Penyusunan profil kesehatan usaha simpan pinjam koperasi
- s. Pemeriksaan hasil penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi
- t. Reviu penerapan dan sanksi bagi koperasi
- u. Peningkatan kapasitas usaha koperasi sector pertanian dan perkebunan
- v. Peningkatan kapasitas usaha koperasi sector peternakan dan perikanan
- w. Peningkatan kapasitas usaha koperasi di kawasan wisata
- x. Peningkatan permodalan koperasi
- y. Peningkatan usaha KSP/USP Koperasi
- z. Pengembangan jaringan usaha koperasi
- aa. Pembinaan usaha sector riil menuju kemitraan usaha
- bb. Pelatihan peningkatan kompetensi waserda
- cc. Pelatihan manajemen dan pengembangan usaha bagi koperasi
- dd. Pelatihan SOM pengelolaan simpan pinjam pembiayaan syariah oleh koperasi bagi pengurus/pengelola
- ee. Pelatihan standar kelayakan usaha (SKU) koperasi bagi pengurus/pengelola
- ff. Optimalisasi peningkatan PAD melalui Mess UPTD Balatkop

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain :

- a. Perkuatan produk UMKM
- b. Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan dilokasi sentra
- c. Peningkatan Gerakan Terpadu Pensejahteraan UMKM Sumatera Barat
- d. Pembekalan ketrampilan bagi wirausaha baru
- e. Fasilitasi pengembangan UMKM
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana PLUT
- g. Peningkatan Pelayanan PLUT
- h. Pengembangan Sarana dan prasarana promosi hasil produksi
- i. Partisipasi Promosi produk UMKM
- j. Sosialisasi dan koordinasi pendaftaran merk dan sertifikasi halal
- k. Temu mitra UMKM
- l. Peningkatan akses pembiayaan UMKM ke perbankan dan lembaga non bank
- m. Pengembangan UMKM kerajinan unggulan sumatera barat
- n. Peningkatan kapasitas kewirausahaan
- o. Pembinaan dan Pengembangan manajemen UKM dilokasi sentra
- p. Pengembangan produk UKM binaan sumatera barat
- q. Pembuatan buku databased UKM unggulan sumatera barat
- r. Pendampingan PLUT
- s. Pelatihan kewirausahaan bagi koperasi dan UMKM
- t. Pelatihan Teknis penyusunan Proposal bagi pelaku UMKM
- u. Pelatihan kewirausahaan bagi UKM kerajinan sumatera barat
- v. Pelatihan pemasaran online bagi UKM kerajinan sumatera barat
- w. Pelatihan manajemen usaha bagi UKM kerajinan sumatera barat
- x. Pelatihan akuntansi bagi UKM berbasis IT
- y. Pelatihan peningkatan teknik komunikasi pemasaran di kawasan wisata
- z. Pelatihan Manajemen usaha bagi UMK Kawasan Wisata
- aa. Pelatihan pengembangan Usaha bagi UMKM
- bb. Pelatihan inovasi makanan ringan bagi UKM
- cc. Pelatihan Akuntansi bagi UMK
- dd. Pelatihan AMT bagi UMK

2. PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 5.1
Tabel Pendanaan Pagu Indikatif

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB													
								2016		2017		2018		2019		2020			2021												
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)											
1		Kapasitas organisasi Dinas Koperasi, UMMKM	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Koperasi, UMMKM					3		3		3		3,01		3,01		3,01													
					Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administratif perkantoran	100%	100%	1.876.000	100%	2.595.000	100%	1.837.000	100%	1.996.000	100%	2.165.000	100%	2.339.000												
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bln	12 bln	20.000	12 bln	40.000	12 bln	40.000	12 bln	43.000	12 bln	45.000	12 bln	52.500		Sekretariat										
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik	12 bln	12 bln	275.000	12 bln	275.000	12 bln	225.000	12 bln	280.000	12 bln	322.000	12 bln	348.700		Sekretariat										
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	12 bln	12 bln	183.000	12 bln	230.000	12 bln	210.000	12 bln	230.000	12 bln	250.000	12 bln	260.000		Sekretariat										
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12 bln	12 bln	90.000	12 bln	75.000	12 bln	75.000	12 bln	75.000	12 bln	80.000	12 bln	87.500		Sekretariat										
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan adm perkantoran	12 bln	12 bln	50.000	12 bln	78.000	12 bln	78.000	12 bln	78.000	12 bln	80.000	12 bln	91.300		Sekretariat										
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	12 bln	12 bln	35.000	12 bln	35.000	12 bln	35.000	12 bln	35.000	12 bln	40.000	12 bln	48.650		Sekretariat										
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor															Sekretariat										
								33 unit AC 1PK, 4 unit AC 2 PK, 3 unit mesin tik, 2 unit mesin penghanour kertas, 14 unit filing kabinet, 2 unit genset, 1 unit pompa, 2 unit tanki air, 2 unit kulkas, 2 unit rak piring		511.100		33 unit AC 1PK, 4 unit AC 2 PK, 3 unit mesin tik, 2 unit mesin penghanour kertas, 14 unit filing kabinet, 2 unit genset, 1 unit pompa, 2 unit tanki air, 2 unit kulkas, 2 unit rak piring		725.000		3 unit AC 1PK, 1 unit mesin tik, 6 unit filing kabinet, 1 unit genset		85.000		4 unit AC 2 PK, 5 unit filing kabinet, 2 unit genset		100.000		2 unit AC 1PK, 1 unit mesin tik, 1 unit mesin penghanour kertas, 3 unit filing kabinet		140.000		4 unit AC 2 PK, 3 unit mesin tik, 4 unit filing kabinet, 1 unit genset, 1 unit pompa,		153.200	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2016		2017		2018		2019		2020			2021	
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12 bln	12 bln	15.000	12 bln	20.000	12 bln	20.000	12 bln	20.000	12 bln	25.000	12 bln	32.700	Sekretariat
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minuman	2000 kotak	2000 kotak	40.000	2000 kotak	50.000	2000 kotak	50.000	2000 kotak	50.000	2000 kotak	55.000	2000 kotak	66.450	Sekretariat
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terlaksananya rapat, koordinasi dan konsultasi	12 bln	12 bln	300.000	12 bln	538.000	12 bln	538.000	12 bln	550.000	12 bln	580.000	12 bln	580.000	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Tersedianya Jasa Sopir Kantor	12 bln	12 bln	83.000	12 bln	100.000	12 bln	100.000	12 bln	100.000	12 bln	110.000	12 bln	125.000	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Tersedianya Jasa Pengaman Kantor	12 bln	12 bln	209.494	12 bln	270.000	12 bln	240.000	12 bln	270.000	12 bln	280.000	12 bln	295.000	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Tersedianya jasa informasi, dok. Dan publikasi	12 bln	12 bln	45.400	12 bln	140.000	12 bln	120.000	12 bln	140.000	12 bln	150.000	12 bln	183.000	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Tersedianya mental dan fisik aparatur	12 bln	12 bln	19.000	12 bln	21.000	12 bln	21.000	12 bln	25.000	12 bln	28.000	12 bln	35.000	Sekretariat
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	2.656.000	100%	2.622.000	100%	1.350.000	100%	1.468.000	100%	1.588.376	100%	1.720.211	Sekretariat
					Pengadaan peralatan gedung kantor			1 set verticalblind, 30 set westafel kamar mandi		214.000										

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2016		2017		2018		2019		2020			2021	
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan operasional kantor			1 unit kendaraan operasional	416.728				1 unit kendaraan operasional	435.000	2 unit kendaraan operasional	558.000	Sekretariat		
					Pengadaan Meubelir Kantor	Tersedianya meubelir Kantor		1 set meja workstation (8 meja), 3 set workstation (3 meja), 12 unit meja makan, 15 unit kursi kerja, 70 unit kursi makan, 60 set tempat tidur, 2 unit sofa, 9 unit lemari arsip, 4 unit lemari buku, 30 unit lemari pakaian, 30 unit meja rias, 1 set lemari arsip dorong	1.285.450	1.317.310	422.300	461.100	219.478	225.000				Sekretariat		
					Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya Komputer dan Jaringan Komputerisasi		14 unit komputer, 8 unit laptop, 14 unit printer, 14 unit UPS	377.000	210.000	210.000	235.000	175.000	180.711						
					Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Tersedianyan Alat studio, alat komunikasi dan alat informasi		Kamera 1 unit, TV 2 unit, LCD Proyektor3 unit, sound sistem 1 set, warless 2 unit, 1 unit mic conference, 2 unit faximile	303.550	181.550	190.550	210.500	185.000	165.000					Sekretariat	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2016		2017		2018		2019		2020			2021	
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio, Alat komunikasi, Alat informasi	Terpeliharanya alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	faximile 2 unit, televisi 3 unit, warless 2 unit, mic conference 1 unit, speaker 5 unit, tape recorder 2 unit, amplier 2 unit, kamera 2 unit		15.000		15.000		18.750		18.725		19.320		20.000	Sekretariat
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung	1 Gedung Dinas, 1 Gedung UPTD		190.000		177.000		182.500		192.750		195.880		197.500	Sekretariat
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan operasional	Balatkop mobil 3 unit, motor 10 unit		90.000		100.000		112.500		120.275		128.500		130.000	Sekretariat
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan	AC 21 unit, Genset 4 unit, mesin tik 15 unit, mesin absen 2 unit, pompa air 5 unit, kipas angin 13 unit.		20.000		20.000		22.000		25.000		25.000		28.000	Sekretariat
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Terpeliharanya meubeler	kursi staf 15 unit, meja staf 10 unit, meja eselon 8 unit, lemari kayu 8 unit, lemari besi 8 unit, filing kabinet 8 unit, meja rapat 15 unit, kursi rapat 33 unit, rak arsip 1 unit, sofa 1 unit		16.000		16.000		18.250		20.000		20.000		22.000	Sekretariat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2016		2017		2018		2019		2020			2021	
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terpeliharanya Komputer dan jaringan	komputer 18 unit, laptop 15 unit, printer 18 unit, UPS 15 unit, jaringan LAN 1 set		30.000		30.000		32.500		35.000		35.000		37.000	Sekretariat
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Terpeliharanya instalasi dan jaringan	2 gedung	80.000	2 gedung	50.000	2 gedung	55.000	2 gedung	60.000	2 gedung	60.000	2 gedung	65.000	Sekretariat	
					Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terkelolanya aset SKPD	12 bln	35.000	12 bln	88.412	12 bln	85.650	12 bln	89.650	12 bln	90.000	12 bln	92.000	Sekretariat	
					Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	84 org	84 org	45.000	84 org	58.000	84 org	60.000	84 org	73.000	84 org	78.986	84 org	85.542	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi aparatur	84	84	45	84	58.000	84	60.000	84	73.000	84	78.986	84	85.542	Sekretariat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2016		2017		2018		2019		2020			2021	
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)
					Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	5 org	5 org	50.000	5 org	104.000	5 org	200.000	5 org	216.000	5 org	233.712	5 org	253.110	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya jumlah aparat yang mengikuti Bintek perundang-undangan	5 org	5 org	50.000	5 org	104.000	5 org	200.000	5 org	218.000	5 org	233.712	5 org	253.110	Sekretariat
2			Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UMKM				B			B					BB			BB		
					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	100%	100%	518	12	667.000	12	705.000	12	761.400	12	823.835	12	892.213	
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD (Lakip, LKPJ, LPPD, EKPD)		6 lap	35.000	6 lap	74.375	6 lap	78.615	6 lap	85.000	6 lap	98.235	6 lap	116.213	Sekretariat
					Penyusunan Perencanaan dan anggaran SKPD	Tersusunnya perencanaan dan anggaran SKPD		6 Dok	151.500	6 Dok	112.825	6 Dok	135.875	6 Dok	148.600	6 Dok	155.800	6 Dok	175.000	Sekretariat
					Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Tersusunnya laporan Monev program urusan KUMKM		2 Lap	81.500	2 Lap	90.350	2 Lap	95.220	2 Lap	102.800	2 Lap	114.000	2 Lap	118.000	Sekretariat
					Pengembangan dan Peningkatan Data dan Informasi	Tersusunnya data dan informasi		1 data based	40.000	1 data based	53.850	1 data based	55.290	1 data based	62.000	1 data based	68.500	1 data based	90.500	Sekretariat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2016		2017		2018		2019		2020			2021	
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)
3			Opini BPK dan Publik tentang Laporan atas Kinerja Keuangan Dinas Koperasi, UMKM				B	B	B	B	B	BB	BB							
					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya tertib administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
					Penatausahaan Keuangan SKPD	Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	210.000	12 bln	336.000	12 bln	340.000	12 bln	365.000	12 bln	387.500	12 bln	392.500	Sekretariat
4	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi	Meningkatnya koperasi berkualitas	Pertumbuhan koperasi berkualitas		Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		2	2	720.000	4	1.428.000	6	1.884.000	8	2.034.720	10	2.201.567	12	2.384.297	
					Penilaian koperasi berprestasi/koperasi award	Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi/koperasi award		20	125.428	25	228.000	25	150.000	25	204.720	25	258.567	25	280.297	Bidang BKPK
					Penilaian dan usulan tanda penghargaan bagi tokoh koperasi	Terlaksananya penilaian dan usulan tanda penghargaan bagi tokoh koperasi		7	279.000	7	350.000	7	-	7	245.000			7	279.000	Bidang BKPK

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2016		2017		2018		2019		2020			2021	
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)
					Bimtek pengembangan koperasi berkualitas	Terlaksananya bimtek pengembangan koperasi berkualitas					40	125.000	40	90.000	45	105.000	45	110.000	Bidang BKPK	
					Sertifikasi pengelola koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikasi					20	164.000	20	90.000	20	105.000	20	105.000	Bidang BKPK	
					Bimtek peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian	Terlaksananya bimtek peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian			150	140.000	150	80.000	150	80.000	150	100.000	150	80.000	Bidang BKPK	
					Pelatihan Teknis penghitungan Pajak bagi Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Teknis penghitungan Pajak bagi Koperasi	60 org, 2 Akt	132.787			60 org, 2 Akt	120.000			60 org, 2 Akt	145.000			UPTD Balatkop	
					Pelatihan Penilaian kesehatan Simpan Pinjam bagi Pembina	Terlaksananya Pelatihan Penilaian kesehatan Simpan Pinjam bagi Pembina	60 org, 2 Akt	132.787			60 org, 2 Akt	120.000	60 org, 3 akt	120.000			60 org, 3 akt	140.000	UPTD Balatkop	
					Sinkronisasi program dan Kegiatan pelatihan Perkoperasian dan UMKM	Terlaksananya koordinasi tentang program dan Kegiatan pelatihan Perkoperasian dan UMKM	30 org Aparatur di Kab./Kota	50.000			30 org Aparatur di Kab./Kota	45.000	30 org Aparatur di Kab./Kota	50.000	30 org Aparatur di Kab./Kota	55.000	30 org Aparatur di Kab./Kota	60.000	UPTD Balatkop	
					Pelatihan Bisnis Plan bagi Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Bisnis Plan bagi Koperasi			150 org, 3 Akt	380.000	80 org, 2 akt	120.000	60 org, 2 akt	120.000	60 org, 2 akt	145.000			UPTD Balatkop	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2016		2017		2018		2019		2020			2021	
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)
					Pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM				150 org, 3 Akt	350.000	80 org, 2 akt	120.000	80 org, 2 akt	120.000	80 org, 2 akt	145.000			UPTD Balatkop
					Pelatihan Penataan kelembagaan Koperasi di sektor riil	Terlaksananya Pelatihan Penataan kelembagaan Koperasi di sektor riil						30 org, 1 akt	85.000	30 org, 1 akt	85.000			80 org, 2 akt	150.000	UPTD Balatkop
					Pelatihan Penerapan Manajemen Resiko bagi pengurus KSPPS/USPPS	Terlaksananya Pelatihan Penerapan Manajemen Resiko bagi pengurus KSPPS/USPPS						30 org, 1 akt	85.000	30 org, 1 akt	85.000	80 org, 2 Akt	145.000	80 org, 2 Akt	150.000	UPTD Balatkop
					Pelatihan Perkoperasian bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)						30 org, 1 akt	85.000	30 org, 1 akt	85.000	80 org, 2 Akt	145.000	80 org, 2 akt	150.000	UPTD Balatkop
					Pelatihan Manajerial bagi KSP PS/USP PS	Terlaksananya Pelatihan Manajerial bagi KSP PS/USP PS						30 org, 1 akt	85.000	30 org, 1 akt	85.000	80 org, 2 Akt	145.000	80 org, 2 akt	150.000	UPTD Balatkop
					Pelatihan Standar Kompetensi Ritel Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Standar Kompetensi Ritel Koperasi						30 org, 1 akt	85.000	30 org, 1 akt	85.000	80 org, 2 Akt	145.000	80 org, 2 Akt	150.000	UPTD Balatkop
					Pelatihan Standar Kompetensi bagi pengelola KJK	Terlaksananya Pelatihan Standar Kompetensi bagi pengelola KJK						30 org, 1 akt	85.000	30 org, 1 akt	85.000	30 org, 1 akt	95.000	30 org, 1 akt	105.000	UPTD Balatkop

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2016		2017		2018		2019		2020			2021	
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)
					Pelatihan Pengawasan Koperasi bagi Aparatur	Terlaksananya Pelatihan Pengawasan Koperasi bagi Aparatur					30 org, 1 akt	85.000	30 org, 1 akt	85.000	30 org, 1 akt	95.000	30 org, 1 akt	105.000	UPTD Balatkop	
					Pelatihan SKU bagi Pengelola Koperasi	Terlaksananya Pelatihan SKU bagi Pengelola Koperasi					30 org, 1 akt	85.000	60 org, 2 Akt	120.000	60 org, 2 Akt	145.000	60 org, 2 Akt	150.000	UPTD Balatkop	
					Pelatihan Manajemen Usaha Koperasi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Usaha Koperasi bagi Pengurus/Pengelola Koperasi					30 org, 1 akt	85.000	60 org, 2 Akt	120.000	60 org, 2 Akt	145.000	60 org, 2 Akt	150.000	UPTD Balatkop	
					Pelatihan Penataan Kelembagaan dan Prosedur Pengsahan Akta Koperasi bagi Pembina	Terlaksananya Pelatihan Penataan Kelembagaan dan Prosedur Pengsahan Akta Koperasi bagi Pembina					30 org, 1 akt	75.000	30 org, 1 akt	80.000	30 org, 1 akt	85.000	30 org, 1 akt	90.000	UPTD Balatkop	
5	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi	Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase koperasi aktif		Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		70,4	71	600.000	71,8	554.000	72,6	832.000	73,4	898.560	74,2	972.242	75	1.052.938	
					Pembinaan koperasi tidak aktif	Terlaksananya pembinaan koperasi tidak aktif		6	75.000	7	94.000	8	85.000	9	100.000	7	112.242	8	125.000	Bidang BKPK
					Revitalisasi kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi yang direvitalisasi kelembagaannya		30	184.428	30	225.000	30	222.000	30	233.580	30	250.000	30	272.938	Bidang BKPK

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
								2016		2017		2018		2019		2020			2021		
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)	
					Pembubaran koperasi primer dan sekunder provinsi yang tidak aktif	Terlaksananya pembubaran koperasi primer dan sekunder provinsi yang tidak aktif		10	75.000	10	85.000	10	75.000	10	85.000	10	100.000	10	115.000	Bidang BKPK	
					Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pembina tentang Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pembina tentang Koperasi		60 org, 2 Akt	132.787			60 org, 2 Akt	150.000			60 org, 2 Akt	170.000	90 org, 3 akt	270.000	UPTD Balatkop	
					Pelatihan Akuntansi bagi pengurus/pengelola Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi bagi pengurus/pengelola Koperasi		60 org, 2 Akt	132.787	60 org, 2 Akt	150.000	60 org, 2 Akt	150.000	90 org, 3 akt	240.000	60 org, 2 akt	170.000			UPTD Balatkop	
					Pelatihan Penyelenggaraan RAT bagi Pembina dan Pengurus Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Penyelenggaraan RAT bagi Pembina dan Pengurus Koperasi						60 org, 2 Akt	150.000	90 org, 3 Akt	240.000	60 org, 2 Akt	170.000	90 org, 3 akt	270.000	UPTD Balatkop	
6	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi	Meningkatnya koperasi berkualitas	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi		Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		5,75	6	155	6,25	423	6,5	684	6,75	739	7	799	7,25	866		
					Pemasyarakatan perkoperasian bagi pemangku kepentingan	Terlaksananya pemasyarakatan perkoperasian bagi pemangku kepentingan		870	244.000	870	244.000	870	244.000	870	244.000	870	244.000	870	244.000		Bidang BKPK

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2016		2017		2018		2019		2020			2021	
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)
					Sosialisasi perkoperasian dilokasi TMMD/N	Terlaksananya sosialisasi perkoperasian dilokasi TMMD/N		3	41.000	3	50.000	3	50.000	3	60.000	3	60.000	3	60.000	Bidang BKPK
					Penyuluhan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif	Terlaksananya penyuluhan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif		375	100.000	375	100.000	375	125.000	375	150.000	375	150.000	375	150.000	Bidang BKPK
7	Meningkatnya peran koperasi sektor riil dan usaha simpan pinjam koperasi dalam perekonomian daerah	Meningkatnya peran usaha koperasi sektor riil dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah	Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil		Program Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi		1,5	1,5	1.250.000	3	1.967.000	4,5	2.492.000	6	2.691.360	7,5	2.912.052	9	3.153.752	
					Pembinaan Peningkatan daya saing Koperasi/KUD sektor Pertanian	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek dan Rakor		50 org	60.000	108 org	162.140	100 org	162.000	100	166.360	100	200.000	100	220.000	Bidang PUK
					Revitalisasi Usaha Koperasi Pertanian	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek, Rapat dan Temu Koperasi		50 org	70.000	480 org	258.000	400 org	300.000	400 org	325.000	400 org	340.000	400 org	375.000	Bidang PUK
					Peningkatan Usaha Ritel Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek dan Rakor, serta kop yang menerima bantuan		2 x 60 org	100.000	2 x 60 org	203.000	2 x 60 org	250.000	2 x 60 org	300.000	2 x 60 org	320.000	2 x 60 org	400.000	Bidang PUK

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2016		2017		2018		2019		2020			2021	
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)
					Koordinasi Pembinaan Usaha Koperasi Pengelola Pasar dan Pengelola Pasar rakyat	Jumlah peserta bimtek/rapat pengelolaan pasar		2 x 60 org	60.000	2 x 60 org, 2 motor kebersihan	183.204	2 x 60 org, 2 motor kebersihan	180.000	2 x 60 org	140.000	2 x 60 org	160.000	2 x 60 org	200.000	Bidang PUK
					Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui Koperasi	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek dan temu bisnis pengembangan PUD dengan pendekatan OVOP melalui Koperasi		18 kop	135.000	18 kop, bantuan alat untuk 1 kop	675.656	18 kop, bantuan alat untuk kop	700.000	18 kop, bantuan alat untuk kop	800.000	19 kop, bantuan alat untuk kop	810.000	19 kop, bantuan alat untuk kop	825.000	Bidang PUK
					Pembinaan Usaha Koperasi melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)	Jumlah keikutsertaan dalam Harkopnas dan Harkop Prov dan Bimtek Usaha dan Perkoperasian sektor pariwisata		2 kali, 1 x KKI	625.000	2 kali, 3 kop, 1 kali 50 org	265.000	2 kali	220.000	2 kali	230.000	2 kali	260.000	2 kali	265.000	Bidang PUK
					Pembinaan Koperasi sektor Rili menjadi Skala Besar	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek, Rapat dan Temu Koperasi		130 org	200.000	130 org	220.000	130 org	240.000	130 org	260.000	140 org	280.000	150 org	300.000	Bidang PUK
					Pembinaan Usaha Koperasi sektor Pariwisata	Jumlah Bimtek Pembinaan Pembinaan usaha koperasi sektor pariwisata						2 x 60 org	100.000	2 x 60 org	110.000	2 x 60 org	140.000	2 x 60 org	145.000	Bidang PUK
					Pembinaan Usaha Koperasi Kawasan Agrobisnis	Jumlah peserta Rakor/bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Kawasan Agrobisnis						150 org	240.000	130 org	260.000	150 org	270.000	150 org	300.000	Bidang PUK
					Peningkatan peranan koperasi sektor aneka usaha	Jumlah peserta Rakor/bimtek Peningkatan Peran KUMKM sektor aneka usaha						100 org	100.000	100 org	100.000	100 org	112.052	100 org	103.752	Bidang PUK

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2016		2017		2018		2019		2020			2021	
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)
8	Meningkatnya peran koperasi sektor riil dan usaha simpan pinjam koperasi dalam perekonomian daerah	Meningkatnya peran koperasi dalam memberikan pinjaman kepada usaha mikro kecil anggotanya	Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi		Program Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi	1,2	1,2	579.000	2,4	657.000	3,6	1.033.000	4,8	1.115.640	6	1.207.122	7,2	1.307.314		
					Pembinaan dan pelaksanaan pemberian izin usaha simpan pinjam koperasi	Terlaksananya pemberian izin usaha simpan pinjam koperasi		-	-	-	-	30	101.600	30	129.640	30	132.122	30	142.000	Bidang FPUSP
					Pembinaan dan pelaksanaan pemberian izin pembukaan cabang kantor cabang koperasi	Terlaksananya pemberian izin pembukaan cabang usaha simpan pinjam koperasi		-	-	-	-	5	75.600	5	76.000	5	80.000	5	95.000	Bidang FPUSP
					Penilaian Koperasi Simpan Pinjam Award	Terlaksananya penilaian koperasi simpan pinjam Award		-	-	-	-	5	125.000	5	130.000	5	145.000	5	152.000	Bidang FPUSP
					Peningkatan peran usaha simpan pinjam koperasi pola syariah	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi usaha simpan pinjam koperasi pola syariah		10	182.000	10	186.000	10	210.000	10	210.000	10	225.000	10	241.314	Bidang FPUSP
					Pembinaan pelaksanaan usaha simpan pinjam koperasi	Terlaksananya pelaksanaan aturan usaha simpan pinjam koperasi		33	172.000	33	241.000	40	240.800	40	260.000	45	262.500	45	312.000	Bidang FPUSP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2016		2017		2018		2019		2020			2021	
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)
					Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi	Terlaksananya pengawasan kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi		125	225.000	125	230.000	125	280.000	125	310.000	125	342.500	125	385.000	Bidang FPUSP
9	Meningkatnya peran koperasi sektor riil dan usaha simpan pinjam koperasi dalam perekonomian daerah	Meningkatnya peran koperasi dalam memberikan pinjaman kepada usaha mikro kecil anggotanya	Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi		Program Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi		1,3	1,3	379.000	2,6	450.000	3,9	709.000	5,2	765.720	6,5	828.509	7,8	897.275	
					Peningkatan dan evaluasi permodalan koperasi	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi permodalan koperasi		50	195.000	50	450.000	50	279.000	50	312.720	50	337.000	55	371.000	Bidang FPUSP
					Penataan Dana Bergulir yang Dikelola Koperasi	Terlaksananya pembinaan administrasi dana bergulir		20	184.000											
					Pembinaan pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi	Terlaksananya penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi		-	-	-	-	45	125.000	45	130.000	45	152.000	45	172.000	Bidang FPUSP
					Fasilitasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dana bergulir	Terlaksananya pembentukan BLUD dana bergulir		-	-	-	-	1	205.800	1	215.000	1	195.609	1	195.275	Bidang FPUSP
					Fasilitasi penyertaan modal pemerintah bagi koperasi	Terlaksananya penyertaan modal pemerintah ke Koperasi		-	-	-	-	10	99.200	10	108.000	10	144.000	10	159.000	Bidang FPUSP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
								2016		2017		2018		2019		2020			2021		
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)	
10	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian daerah	Meningkatnya skala usaha dan daya saing UMKM	Peningkatan usaha mikro binaan menjadi usaha kecil		Program Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM		1,5	1,5	3.238.000	3	694.000	4,5	944.000	6	1.019.520	7,5	1.103.121	9	1.194.680		
					Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan dilokasi sentra	Terlaksananya peningkatan kelembagaan usaha UMKM dilokasi sentra		8 sentra (160 UMK)	80.000	375 UMK (15 sentra)	159.000	250 UMK (10 sentra)	104.000	250 UMK (10 sentra)	104.520	250 UMK (10 sentra)	110.000	250 UMK (10 sentra)	115.000	Bidang PUMKM	
					Peningkatan Gerakan Terpadu Pensejahteraan UMKM Sumatera Barat	Terlaksananya peningkatan UMK binaan gerakan terpadu pensejahteraan UMKM Sumatera Barat		-	-	2 paket bantuan kemasan utk 2 komoditi	220.000	1 paket bantuankemasan	120.000	1 paket bantuankemasan	120.000	1 paket bantuankemasan	128.121	1 paket bantuankemasan	134.680	Bidang PUMKM	
						Terlaksananya bantuan sarana PKL dan kemasan bagi UMK binaan gerakan terpadu				60 unit etalase utk 60 PKL		30 unit etalase utk 30 PKL		30 unit etalase utk 30 PKL		30 unit etalase utk 30 PKL		30 unit etalase utk 30 PKL			
						Terlaksananya Bimtek pemasaran online		45 UKM (7 wilayah)	88.138	200 UKM		200 UKM		200 UKM		200 UKM		200 UKM			
					Pembekalan ketrampilan bagi wirausaha baru	Terlaksananya pembekalan ketrampilan bagi wirausaha baru		-	-	-	-	200 UKM	85.000	200 UKM	90.000	200 UKM	100.000	200 UKM	100.000		Bidang PUMKM

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB		
								2016		2017		2018		2019		2020			2021	
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)
					Fasilitasi pengembangan UMKM	Terlaksananya pendampingan UMKM melalui generasi muda penggiat UMKM		-	-	-	-	38 orang penggiat	85.000	38 orang penggiat	90.000	38 orang penggiat	100.000	38 orang penggiat	110.000	Bidang PUMKM
						Terlaksananya Forum Group Discussion (FGD) pengembangan UMKM						40 org		40 org		40 org		40 org		
						Terlaksananya studi banding dan magang pada usaha yg sukses						10 org		10 org		10 org		10 org		
					Temu mitra UMKM	Terlaksananya temu mitra UMKM		25 UMKM	60.000	30 UMKM	75.000	30 UMKM	75.000	30 UMKM	75.000	30 UMKM	75.000	30 UMKM	75.000	Bidang PUMKM
					Peningkatan akses pembiayaan UMKM ke perbankan dan lembaga non bank	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi PKBL-BUMN dan program KUR		240 UMKM	175.079	240 UMKM	120.000	240 UMKM	100.000	240 UMKM	100.000	240 UMKM	100.000	240 UMKM	110.000	Bidang PUMKM
					Pelatihan Teknis penyusunan Proposal bagi pelaku UMKM	Terlaksananya Pelatihan Teknis penyusunan Proposal bagi pelaku UMKM		60 org, 2 Akt	132.787			60 org, 2 Akt	75.000	60 org, 2 Akt	80.000	60 org, 2 Akt	90.000	60 org, 2 Akt	110.000	UPTD Balatkop
					Pelatihan Teknis Pengembangan Usaha Bagi UMK Wirausaha Pemula (DAK)	Terlaksananya pelatihan teknis pengembangan usaha bagi UMK Wirausaha Pemula			216.737											UPTD Balatkop
					Pelatihan Teknis Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Kawasan Wisata (DAK)	Terlaksananya pelatihan teknis pengembangan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Kawasan Wisata			222.316											UPTD Balatkop

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN												SKPD PENANGGUNG JAWAB
								2016		2017		2018		2019		2020		2021		
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	
					Pelatihan Manajemen usaha bagi UMK Kawasan Wisata	Terlaksananya Pelatihan Manajemen usaha bagi UMK Kawasan Wisata				150 org, 3 Akt	120.000	90 org, 3 akt	75.000	90 org, 3 akt	90.000	90 org, 3 akt	100.000	90 org, 3 akt	110.000	UPTD Balatkop
					Pelatihan pengembangan Usaha bagi UMKM	Terlaksananya Pelatihan pengembangan Usaha bagi UMKM						60 org, 2 Akt	75.000	60 org, 2 Akt	90.000	60 org, 2 Akt	100.000	90 org, 3 akt	110.000	UPTD Balatkop
					Pelatihan Akuntansi bagi UMK	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi bagi UMK						60 org, 2 Akt	75.000	60 org, 2 Akt	90.000	60 org, 2 Akt	100.000	90 org, 3 akt	110.000	UPTD Balatkop
					Pelatihan AMT bagi UMK	Terlaksananya Pelatihan AMT bagi UMK						60 org, 2 Akt	75.000	60 org, 2 Akt	90.000	60 org, 2 Akt	100.000	90 org, 3 akt	110.000	UPTD Balatkop
									1.342.000	2.017	1.622.000	2.018	1.872.000	-	2.021.760	2.020	2.187.544	2.021	2.369.110	
11	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian daerah	Meningkatnya skala usaha dan daya saing UMKM	Peningkatan usaha kecil binaan menjadi usaha menengah		Program Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM		0,5	0,5	1.343.000	1	1.622.000	1,5	1.872.000	2	2.021.760	2,5	2.187.544	3	2.369.110	
					Perkuatan produk UMKM	Terlaksananya peningkatan produk UMKM	450 UKM (10 wilayah)	275.000	180 UMK (6 wilayah)	300.000	150 UMK (5 wilayah)	322.000	150 UMK (5 wilayah)	380.000	150 UMK (5 wilayah)	400.000	150 UMK (5 wilayah)	425.000		Bidang PUMKM
						Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana produksi UKM				mesin jahit 35 unit, mesin obras 15										

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KINERJA PENDANAAN										SKPD PENANGGUNG JAWAB			
								2016		2017		2018		2019		2020			2021		
								T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)	T	Rp. (Jt)		T	Rp. (Jt)	
					Pendampingan PLUT	Terlaksananya pendampingan PLUT		-	-	-	-	500 UKM	200.000	500 UKM	235.000	500 UKM	250.000	500 UKM	280.000	Bidang PUMKM	
					Pengembangan Sarana dan prasarana promosi hasil produksi	Tersedianya sarana dan prasarana promosi hasil produksi		-	-	-	-	etalase, pajangan produk, patung.	400.000	etalase, pajangan produk, patung.	251.760	etalase, pajangan produk, patung.	300.000	-	328.000	Bidang PUMKM	
					Partisipasi Promosi produk UMKM	Partisipasi promosi produk UMKM		18 UMKM (4 event)	542.000	5 event	580.000	6 event	600.000	6 event	650.000	6 event	700.000	6 event	758.110	Bidang PUMKM	
					Pengembangan UMKM Pengrajin	Terlaksananya temu bisnis UMKM Pengrajin Sumbang dengan Prov. Batam, Kaltim dan Bandung			300.000		342.000		350.000		380.000		387.544		400.000	Bidang PUMKM	
					Pembuatan Website Pemasaran	Terlaksananya pembuatan portal promosi dalam bentuk web			50.000		125.000				125.000		150.000		180.000	Bidang PUMKM	
					Bimtek Peningkatan Pemasaran Produk UMKM	Terlaksananya bimtek identifikasi UKM yang akan dipasarkan melalui internet			175.000		275.000										
12	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian daerah	Meningkatnya skala usaha dan daya saing UMKM	Jumlah produk UMKM yang terstandarisasi		Program Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM		40	40	146.000	140	360.000	240	605.000	340	653.000	440	707.000	540	766.000		
					Sosialisasi dan koordinasi pendaftaran merk dan sertifikasi halal	Terlaksananya fasilitasi pendaftaran merek dan halal bagi UMKM		55 UMKM	148.000	80 UMKM	360.000	80 UMKM	605.000	90 UMKM	653.000	90 UMKM	707.000	90 UMKM	766.000	Bidang PUMKM	

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI
SUMATERA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, pada misi ke 4 yaitu : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah , sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi keempat adalah: a) Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah, b) Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, c) Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis d) Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, f) Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman g) Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, h) Menurunnya jumlah penduduk miskin, j) Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, k) Menuntaskan penanganan daerah tertinggal, l) Menurunnya tingkat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 6.1
Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat
yang mengacu pada tujuan da sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran Dinas Koperasi UKM	Indikator Kinerja	Target						Akhir Tahun RPJMD
			1	2	3	4	5	6	
	Meningkatnya nilai aset koperasi			8,5%	8,75 %	9%	9,5%	10%	10%
		Koperasi aktif	71%	71,8 %	72,6 %	73,4 %	74,2 %	75%	75%
		Jumlah anggota	6%	6,25 %	6,5%	6,75 %	7%	7,25 %	7,25%

		Tindak lanjut rekomendasi pengawasan dan pemeriksaan	-	50 Kop	55 Kop	60 Kop	65 Kop	70 Kop	70 Kop
	Meningkatnya nilai omset koperasi		7,5%	7,5%	7,75 %	9,5%	9,75 %	10%	13%
		Pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil							
		Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam							
		Pertumbuhan permodalan usaha koperasi							
	Meningkatnya skala usaha UKM		1,2%	1,7%	2,1%	2,6%	3,15	1,2%	1,2%
		Meningkatnya usaha kecil menjadi usaha menengah	1,2%	1,2%	2%	2%	2%	2%	2%
		Meningkatnya kemitraan usaha UKM	5 Kemitraan/Mou	5 Kemitraan/MoU	5 Kemitraan/Mou	5 Kemitraan/MoU	5 Kemitraan/MoU	5 Kemitraan/MoU	30 Kemitraan/MoU
		Meningkatnya keunggulan kompetitif UKM terstandarisasi	-	40 UKM	40 UKM	40 UKM	40 UKM	40 UKM	160 UKM
	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja		-	B	BB	BB	BB	BB	BB

		Capaian realisasi fisik pengelolaan program/kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian realisasi keuangan pengelolaan program/keuangan	95%	95%	96%	96%	96%	96%	96%

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM